



Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021



TIM PENGENDALIAN
INFLASI PUSAT (TPIP)

Desember 2018



Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

Tim Pengendalian Inflasi Pusat
(TPIP)



Daftar Isi

Daftar Isi	ii	Bab III. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021	13
Daftar Grafik	iii	III. 1. Arah Kebijakan	15
Daftar Gambar	vi	III. 2. <i>Gap Analysis</i> Strategi Utama 4K	19
Daftar Tabel	vii	III. 2. 1. <i>Gap Analysis</i> Keterjangkauan Harga	20
Prakata	ix	III. 2. 2. <i>Gap Analysis</i> Ketersediaan Pasokan	23
Ringkasan Eksekutif	x	III. 2. 3. <i>Gap Analysis</i> Kelancaran Distribusi	26
Bab I. Latar Belakang	1	III. 2. 4. <i>Gap Analysis</i> Komunikasi Efektif	29
Bab II. Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015 – 2018	7	III. 3. Program Strategis	31
		III. 3. 1. Keterjangkauan Harga	31
		III. 3. 2. Ketersediaan Pasokan	32
		III. 3. 3. Kelancaran Distribusi	37
		III. 3. 4. Komunikasi Efektif	39
		Lampiran	43

Daftar Grafik

Grafik I.1. Rezim Inflasi Inti	3	Grafik II.2. Perkembangan Determinan Inflasi Inti	9
Grafik I.2. Rezim Inflasi <i>Volatile Food</i>	3	Grafik II.3. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah	9
Grafik I.3. Rezim Inflasi <i>Administered Prices</i>	3	Grafik II.4. Porsi Volume Konsumsi BBM	11
Grafik I.4. Sebaran Inflasi Provinsi	4	Grafik II.5. Kebijakan <i>Administered Prices</i>	11
Grafik I.5. Persentase Provinsi yang Inflasinya Masuk Sasaran	4	Grafik III.1. Rata-rata Historis dan Sasaran Inflasi IHK, Inti, <i>Volatile Food</i> , dan <i>Administered Prices</i>	15
Grafik I.6. Inflasi IHK Indonesia dan Kawasan	4	Grafik III.2. Faktor Musiman Komoditas Bawang Merah	16
Grafik I.7. Inflasi Inti Indonesia dan Kawasan	4	Grafik III.3. Faktor Musiman Komoditas Daging Ayam Ras	16
Grafik I.8. Inflasi Pangan Indonesia dan Kawasan	5	Grafik III.4. Faktor Musiman Komoditas Beras	16
Grafik I.9. Harga Beras Indonesia dan Thailand	5	Grafik III.5. Pasokan Di Pasar Induk	16
Grafik I.10. Realisasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	6	Grafik III.6. Disparitas Harga Gabah dan Beras	17
Grafik II.1. Realisasi Inflasi HBKN (mtm)	9	Grafik III.7. Disparitas Harga Daging Ayam Ras Peternak dan Konsumen	17
		Grafik III.8. Inflasi IHK dan Harga Minyak Dunia	17

Grafik III.9. <i>Output Gap</i> Indonesia	17	Grafik III.21. Indeks Harga <i>Imported Inflation</i>	22
Grafik III.10. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	18	Grafik III.22. Konsumsi Beras Beberapa Negara	22
Grafik III.11. Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Inti <i>Traded</i>	18	Grafik III.23. Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita (kg)	22
Grafik III.12. Inflasi Inti <i>Food, Volatile Food</i> dan 10 Komoditas Pangan Strategis	19	Grafik III.24. Indikator Produktivitas Beras Berbagai Negara (Tingkat Rendeman Beras)	23
Grafik III.13. Bobot Inflasi 10 Komoditas Pangan Strategis Terhadap Inflasi IHK Pangan	19	Grafik III.25. Rasio Lahan dan Kelengkapan Irigasi – Perbandingan Beberapa Negara	23
Grafik III.14. Inflasi Komoditas Pangan Strategis (1)	20	Grafik III.26. Status Kerusakan Infrastruktur Irigasi Berdasarkan Wewenang Pemerintah	23
Grafik III.15. Inflasi Komoditas Pangan Strategis (2)	20	Grafik III.27. Perkembangan Infrastruktur Ketahanan Pangan – 2017	24
Grafik III.16. Volatilitas Inflasi Komoditas Pangan Strategis (1)	20	Grafik III.28. Fokus Infrastruktur Ketahanan Pangan 2018	24
Grafik III.17. Volatilitas Inflasi Komoditas Pangan Strategis (2)	21	Grafik III.29. Stok Akhir Beras BULOG	24
Grafik III.18. Pangsa Komoditas Strategis dalam IHK dan Perkembangan 2018 Dibandingkan Historis	21	Grafik III.30. Impor Daging Sapi	24
Grafik III.19. Realisasi Operasi Pasar BULOG	21	Grafik III.31. Perbandingan Harga Komoditas Daging Ayam Ras di Daerah dan Nasional	26
Grafik III.20. Inflasi Inti, Indeks Harga Komoditas Global, IHPB Impor dan Nilai Tukar Rupiah	22		

Grafik III.32. Perbandingan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Daerah dan Nasional	26
Grafik III.33. Perbandingan Harga Komoditas Daging Sapi di Daerah dan Nasional	26
Grafik III.34. Perbandingan Harga Komoditas Bawang Merah di Daerah dan Nasional	26
Grafik III.35. Jumlah Desa Yang Tidak Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun	27
Grafik III.36. Realisasi Penyaluran Dana Desa	27
Grafik III.37. Inflasi Tarif Pulsa Ponsel	29
Grafik III.38. Infasi Beras	29

Daftar Gambar

Gambar II.1. *Timeline* Kebijakan Energi 2014 - 2018 **10**

Gambar III.1. Peta Inflasi Beras Daerah Surplus/Defisit **16**

Gambar III.2. *Policy Direction* Pengendalian Inflasi 2018 - 2021 **18**

Gambar III.3. Strategi Utama 4K dan Indikator Keberhasilan **20**

Gambar III.4. Fungsi dan Bentuk Lembaga Petani **25**

Gambar III.5. Jumlah Poktan dan Gapoktan Indonesia 2012-2018 **25**

Gambar III.6. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (2017) **27**

Gambar III.7. Peningkatan Kualitas Koneksi Komunikasi **27**

Gambar III.8. Implementasi Palapa Ring (Per w2 Mei 2018) **28**

Gambar III.9. Hasil Verifikasi Lahan Baku Sawah 2017 (Ha) **29**

Gambar III.10. Inflasi Angkutan Udara 2015-2017 (yoy) **30**

Gambar III.11. Rencana Pengembangan Pasar Induk Beras (PIB) **38**

Gambar III.12. Model Perdagangan Pasar Induk Beras Pare-Pare **38**

Gambar III.13. Penyesuaian Pengukuran Kinerja TPID Tahun 2018 **43**

Daftar Tabel

Tabel I.1. Rata-Rata dan Standar Deviasi Inflasi	3
Tabel III.1. Perbandingan Rasio Stok Beras Terhadap Total Konsumsi	24
Tabel III.2. Rincian Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen BULOG	33
Tabel III.3. Anggaran Ketahanan Pangan	35
Tabel III.4. Materi Pembinaan TPID Level Teknis	40
Tabel III.5. Materi Pembinaan TPID Level Kepala Daerah	40

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Prakata



Salam hangat,

Setelah 73 tahun Indonesia merdeka, Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah dengan pondasi yang semakin kuat dan kokoh. Ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 5,4% per tahun selama 7 tahun terakhir. Momentum pertumbuhan tersebut dapat tetap terjaga sebagaimana terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2018 yang mencapai 5,17%.

Saat ini, perekonomian global masih dalam kondisi penuh ketidakpastian dan bergerak menuju keseimbangan baru. Untuk mencapai target-target pembangunan nasional, program pembangunan saat ini dan kedepannya dirancang tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan tinggi semata, namun juga untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dalam jangka menengah panjang. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal ini.

Dalam kurun waktu 2015-2017, realisasi inflasi tahunan telah berhasil dijaga pada rentang sasaran, masing-masing pada level 3,35% (2015), 3,02% (2016) dan 3,61% (2017). Pada tahun 2018, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan mitigasi resiko pada saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, realisasi inflasi mencapai 0,59% (mtm) atau terendah sejak tujuh tahun terakhir. Saya optimis realisasi inflasi tahun 2018 akan kembali terjaga pada kisaran sasaran.

Hasil koordinasi pengendalian inflasi telah berkontribusi pada beberapa indikator lain yang secara konsisten menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 yang mencapai 9,18% merupakan titik terendah sejak tahun 1970. Demikian pula dengan tingkat ketimpangan yang mencapai 0,389 pada Maret 2018, merupakan titik terendah sejak Maret 2012. Selain indikator sosial, tercapainya sasaran inflasi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional. Peringkat *Global Competitiveness Index* meningkat dari 41 menjadi 36. Begitupula peringkat dari UNCTAD sebagai negara yang dinilai memiliki prospek investasi 2017-2019, meningkat dari peringkat ke-8 menjadi ke-4.

Solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk Peta Jalan Pengendalian Inflasi. Peta Jalan yang merupakan amanat dari Keppres 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) serta peraturan pelaksanaannya adalah sebuah kerangka besar yang dapat memastikan koordinasi kebijakan berjalan secara terstruktur, terukur dan berkesinambungan.

Berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sasaran inflasi nasional ke depan telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 124/PMK.010/2017 pada level 3,5%±1% untuk 2019 serta 3%±1% untuk 2020 dan 2021. Penetapan sasaran inflasi yang semakin rendah merupakan upaya untuk menjaga daya saing Indonesia pada level yang tinggi di tingkat kawasan. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 ini disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk menjabarkan langkah-langkah mitigasi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam dan luar negeri, demi menjaga realisasi inflasi ke depan tetap pada kisaran sasarannya.

Melihat fakta bahwa kewenangan dalam pengendalian inflasi nasional melekat kepada beberapa instansi baik pusat maupun daerah, maka komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 ini dapat membuahkan hasil sebagaimana halnya yang pernah dihasilkan dari Peta Jalan sebelumnya. Batasan-batasan, kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki instansi yang terlibat tentunya harus diakomodasi dan diberi ruang yang cukup untuk komunikasi dan harmonisasi.

Mari kita lanjutkan kerja nyata.

Jakarta, 27 Desember 2018
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



DARMIN NASUTION
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Ringkasan Eksekutif

Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Saat ini inflasi di Indonesia berada dalam tren yang menurun dan berada dalam kisaran sasaran inflasi pada empat tahun terakhir (2015-2018) secara berturut-turut. Tren penurunan terjadi pada seluruh disgregasi inflasi, baik inflasi inti, inflasi *administered prices*, maupun inflasi *volatile food*. Selain itu, inflasi di berbagai daerah di Indonesia dalam tiga tahun terakhir juga berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Namun demikian, inflasi di Indonesia masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi di negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu, inflasi Indonesia juga masih dihadapi oleh adanya disparitas inflasi baik antar waktu, antar wilayah dan antar pelaku. Ke depan, untuk membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa mendatang dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi tahun 2019 telah ditetapkan pada kisaran $3,5\% \pm 1,0\%$ (yoy) dan menurun menjadi $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy) di tahun 2020 dan 2021. Sasaran tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018 untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015 – 2018 secara umum telah terlaksana dengan baik. Capaian pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018 untuk kelompok inti antara lain tercermin dari terkelolanya permintaan sesuai kapasitas perekonomian, ekspektasi inflasi yang menurun dan terjangkau pada sasaran inflasi, serta nilai tukar yang terjaga sesuai nilai fundamental. Untuk kelompok *volatile food*, capaian pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018 antara lain tercermin dari tren penurunan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penurunan inflasi dan volatilitas beberapa komoditas pangan utama. Sementara itu, capaian pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018 untuk kelompok *administered prices* antara lain berupa pelaksanaan subsidi tepat sasaran untuk tarif listrik daya 900VA, pengelolaan konsumsi BBM subsidi melalui diversifikasi ke BBM non subsidi dan implementasi pemanfaatan bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM.

Pengendalian inflasi kedepan masih menghadapi beberapa tantangan. Setelah stabil di level sekitar 3% dalam

empat tahun terakhir, kedepan inflasi inti menghadapi tantangan kenaikan inflasi yang bersumber dari meningkatnya permintaan seiring pemulihan ekonomi domestik dan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global yang berisiko pada meningkatnya volatilitas nilai tukar dan selanjutnya dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Sementara itu inflasi *volatile food* masih diwarnai oleh pola siklikal yang kuat terutama komoditas hortikultura. Sementara itu inflasi *volatile food* masih diwarnai oleh pola siklikal yang kuat terutama komoditas hortikultura. Sementara itu, rata-rata inflasi *volatile food* Januari 2015 s.d Desember 2018 mencapai 5,22% (yoy) sehingga perlu *extra effort* untuk menurunkan inflasi ke level sesuai arahan *High Level Meeting* (HLM) TPIP 2017-2018 yakni sebesar 4%-5% (yoy). Untuk kelompok *administered prices*, tantangan ke depan adalah menyeimbangkan kebijakan subsidi tepat sasaran dengan pencapaian sasaran inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 disusun untuk menjawab berbagai tantangan tersebut melalui strategi utama yang disebut 4K. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, HLM TPIP pada 24 Agustus 2018 telah memberikan prioritas arahan kebijakan untuk periode 2019 dan 2020-2021. Untuk tahun 2019, kebijakan difokuskan pada menjaga stabilitas inflasi *volatile food* pada kisaran 4% - 5% (yoy). Untuk tahun 2020-2021 arahan kebijakan adalah penyesuaian kebijakan *administered prices* yang memperhatikan sasaran inflasi IHK dan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas inflasi *volatile food* tidak lebih dari 4% (yoy). Selanjutnya Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dirinci kedalam 4 strategi utama yang disebut sebagai strategi 4K, yaitu terdiri dari Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 difokuskan pada strategi utama Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi. Strategi utama Keterjangkauan Harga memiliki indikator keberhasilan mencapai penurunan rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi pada sepuluh komoditas pangan strategis berturut-turut dalam dua tahun terakhir. Strategi utama Ketersediaan Pasokan memiliki dua indikator keberhasilan yakni meningkatnya rendemen beras dan tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), khusus untuk beras sebesar 1 - 1,5 juta ton. Strategi utama Kelancaran Distribusi memiliki indikator keberhasilan tercapainya penurunan disparitas harga antara provinsi dengan rata-rata nasional (termasuk disparitas antarwaktu). Sementara itu, strategi utama Komunikasi Efektif memiliki tiga indikator keberhasilan yaitu terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam sasaran inflasi, meningkatnya korelasi inflasi data PIHPS dan data BPS, dan meningkatnya kehandalan TPID

dalam pencapaian inflasi daerah. Analisa Gap yang dilakukan terhadap keempat strategi utama menghasilkan prioritas pengendalian inflasi pada strategi Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi. Hasil analisa ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018.

Keempat strategi utama diimplementasikan melalui beberapa program strategis. Strategi Keterjangkauan Harga memiliki dua program strategis, yaitu *Stabilisasi Harga* dan *Mengelola Permintaan*. Beberapa program yang tercakup dalam kedua program strategis tersebut antara lain sinkronisasi perencanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, reformulasi Operasi Pasar, menjaga volatilitas nilai tukar dan mengelola permintaan baik melalui kebijakan Bank Indonesia maupun melalui sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan oleh Pemerintah. Strategi Ketersediaan Pasokan dijabarkan dalam dua program strategis, yaitu: *Penguatan Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan*, serta *Penguatan Kelembagaan*. Beberapa program yang tercakup dalam kedua program strategis tersebut antara lain peningkatan produktivitas, penguatan CPP, perluasan asuransi pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani, serta mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani. Strategi Kelancaran Distribusi dijabarkan dalam dua program strategis, yaitu mendorong *Kerjasama Perdagangan Antar Daerah* dan meningkatkan *Infrastruktur Perdagangan*. Beberapa program yang tercakup dalam kedua program strategis tersebut antara lain pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antardaerah, serta pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi di Jawa dan luar Jawa. Strategi Komunikasi Efektif terdiri dari dua program strategis yaitu memperbaiki *Kualitas Data* dan memperkuat *Koordinasi Pusat dan Daerah*. Beberapa program yang tercakup dalam kedua program strategis tersebut antara lain penyusunan kebijakan Satu Peta Lahan Pertanian, peningkatan korelasi data PIHPS dan BPS, penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok, kebijakan *administered prices* yang sesuai dengan sasaran inflasi IHK dan melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab
01

Latar Belakang



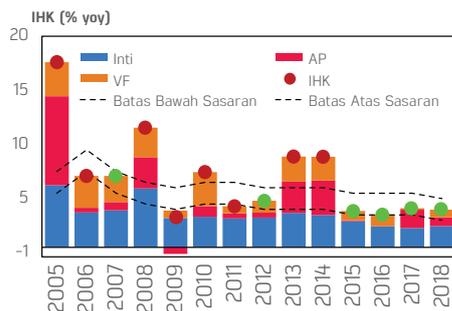
Infografis Latar Belakang Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

INFLASI DALAM TREN MENURUN NAMUN MASIH DI ATAS INFLASI KAWASAN



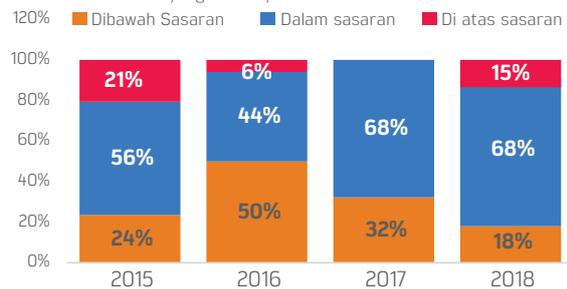
INTI	Des 2018 3,07%	Avg very low regime 3,10%
VF	Des 2018 3,39%	Avg low regime 5,05%
AP	Des 2018 3,36%	Avg low regime 3,63%

Inflasi dalam tren menurun



Inflasi inti berada dalam rezim sangat rendah, VF dan AP dalam rezim rendah.

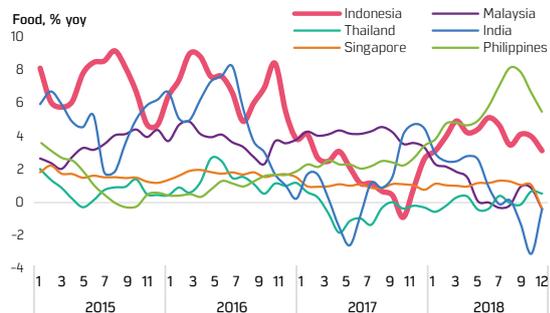
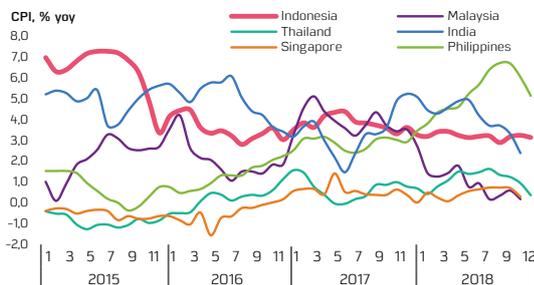
Persentase Provinsi yang Inflasinya Masuk Sasaran



Inflasi berada dalam kisaran sasaran secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir

Secara umum dalam 3 tahun terakhir provinsi yang inflasi masuk sasaran semakin meningkat

NAMUN BELUM SEBAIK INFLASI DI KAWASAN



Inflasi IHK Indonesia secara umum masih lebih tinggi dari inflasi di negara kawasan

Inflasi pangan Indonesia lebih tinggi dari negara di kawasan

ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2018

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS HARGA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF SERTA BERKUALITAS

MEMPERBAIKI NERACA TRANSAKSI BERJALAN

- Perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan investasi berorientasi ekspor maupun substitusi impor, termasuk peningkatan ekspor jasa pariwisata
- Pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk ikut memperbaiki iklim kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan yang mendorong investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor



KOORDINASI KEBIJAKAN PERBAIKAN NERACA TRANSAKSI BERJALAN

MENJAGA INFLASI TETAP RENDAH DAN STABIL

- Pentingnya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi
- Pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah, termasuk mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah untuk biaya transportasi perdagangan antardaerah
- Pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap menjaga berjalannya mekanisme pasar dalam mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan



PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021

Latar Belakang

Laju inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah bersama Bank Indonesia sejak tahun 2005 menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan cara menetapkan sasaran inflasi (*nominal anchor*). Penetapan sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mencapai sasaran dan program kerja pembangunan serta membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, ITF juga menegaskan adanya komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga tren penurunan laju inflasi dalam jangka menengah.

Sejalan dengan penetapan sasaran inflasi tersebut, laju inflasi di Indonesia secara konsisten terus mengalami tren penurunan, bahkan dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 3% sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan. Laju inflasi komponen inti, *volatile food*, dan *administered price* pada periode setelah krisis keuangan global (2010 - 2018) lebih rendah dari periode sebelum krisis (2002 - 2009). Bila dibandingkan dengan rezim inflasi, rata-rata laju inflasi inti pada Januari 2016 s.d. Desember 2018 mencapai 3,10% (yoy), sama dengan rata-rata inflasi pada rezim sangat rendah (Januari 2016 s.d. Desember 2018). Rata-rata laju inflasi *volatile food* pada periode tersebut mencapai 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi pada rezim rendah (Mei 2014 s.d. Desember 2018) sebesar 5,05% (yoy). Sementara itu, rata-rata laju inflasi *administered price* pada periode tersebut mencapai 4,04% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi pada rezim rendah (November 2015 s.d. Desember 2018) sebesar 3,63% (yoy).

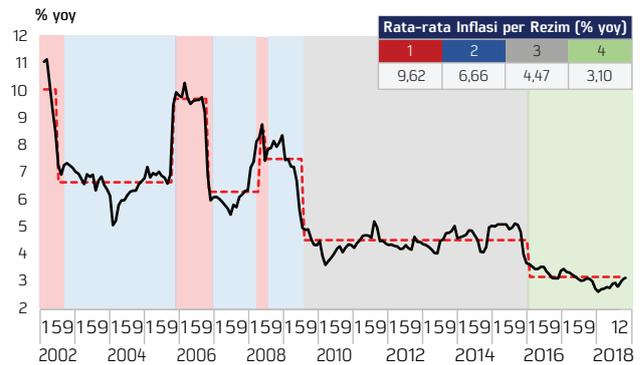
Seluruh Periode

	Before GFC (2002-2009)				After GFC (2010-2018)			
	IHK	INTI	AP	VF	IHK	INTI	AP	VF
Avg	8,74	7,10	13,49	10,21	5,01	4,00	6,23	7,36
St Dev	3,90	1,51	12,30	6,36	1,65	0,72	5,10	6,50

Tanpa Periode Kenaikan Harga BBM								
	Before GFC (2002-2009) excl. 2002, 2003, 2005				After GFC (2010-2018) excl. 2013, 2015			
	IHK	INTI	AP	VF	IHK	INTI	AP	VF
Avg	8,20	6,87	9,27	11,91	4,55	3,83	5,14	6,63
St Dev	3,99	1,55	11,44	5,71	1,39	0,69	4,54	4,08

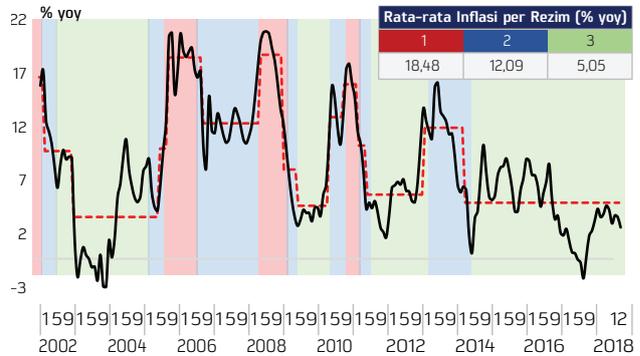
Tabel I.1. Rata-Rata dan Standar Deviasi Inflasi

Sumber: BPS, diolah



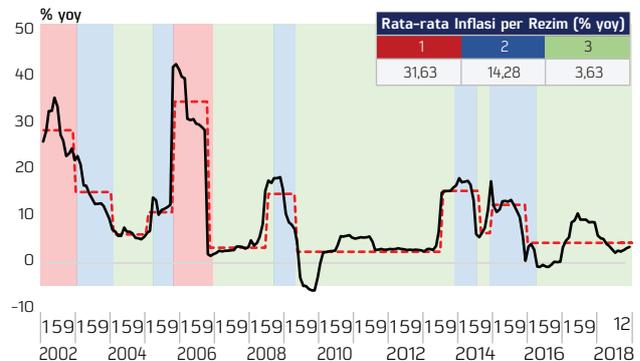
Grafik I.1. Rezim Inflasi Inti

Sumber: BPS, diolah



Grafik I.2. Rezim Inflasi Volatile Food

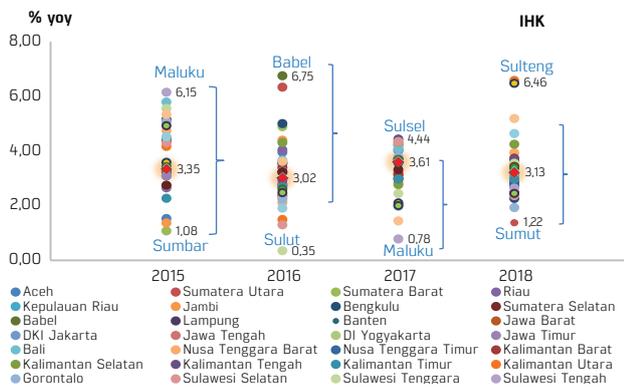
Sumber: BPS, diolah



Grafik I.3. Rezim Inflasi Administered Prices

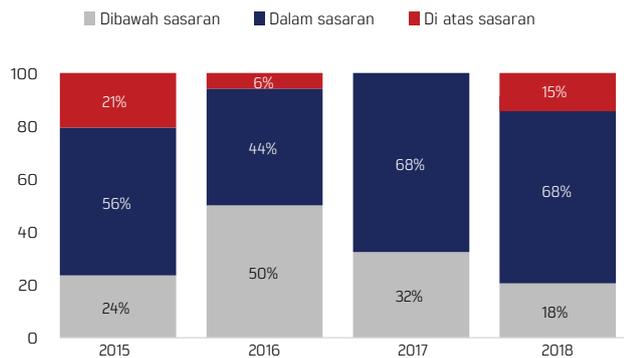
Sumber: BPS, diolah

Tren penurunan laju inflasi juga terlihat secara spasial. Secara umum, laju inflasi di daerah dalam empat tahun terakhir sesuai dengan sasaran inflasi nasional, kecuali untuk Sumatera Utara dan Kalimantan Barat yang masih mencatatkan laju inflasi di sekitar batas atas sasaran inflasi (5%, yoy). Jika dilihat per kawasan, rata-rata laju inflasi umum pada tahun 2015-2018 mencapai 3,18% (yoy) untuk wilayah Jawa, 3,32% (yoy) untuk wilayah Sumatera, dan 3,53% (yoy) untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, persentase provinsi yang inflasinya masuk sasaran terus meningkat yaitu dari 44% pada tahun 2016 menjadi 68% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi juga telah diupayakan baik di tingkat pusat dan daerah, tentunya dengan penguatan koordinasi kebijakan antarinstansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (TPID), serta Bank Indonesia.



Grafik I.4. Sebaran Inflasi Provinsi

Sumber: PIHPS

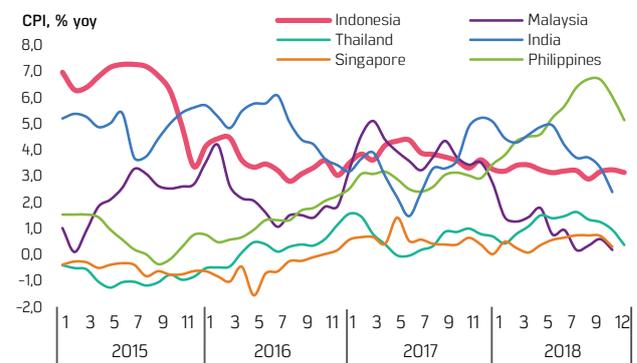


Grafik I.5. Persentase Provinsi yang Inflasinya Masuk Sasaran

Sumber: BPS, diolah

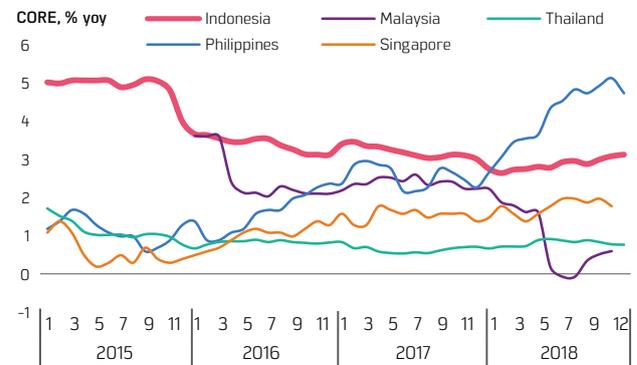
Namun demikian, tingkat inflasi Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di satu kawasan. Tingkat inflasi Indonesia di tahun 2018 ini masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Meskipun begitu, laju inflasi Indonesia mulai mengalami penurunan. Rata-rata inflasi tahunan Indonesia pada 2018 mencapai 3,20% (yoy),

jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang berada pada kisaran 5,13% (yoy) sebagai akibat peningkatan harga minyak, pelemahan mata uang Peso, dan kekurangan stok pangan karena badai. Apabila memperhatikan tingkat inflasi komponen inti, tingkat inflasi inti Indonesia juga masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Inflasi inti Indonesia dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran 3% - 5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada kisaran 0,5% - 3% (yoy). Hanya pada tahun 2018, tingkat inflasi inti Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi inti Filipina tahun 2018 yang relatif tinggi mencapai 4,09% (yoy).



Grafik I.6. Inflasi IHK Indonesia dan Kawasan

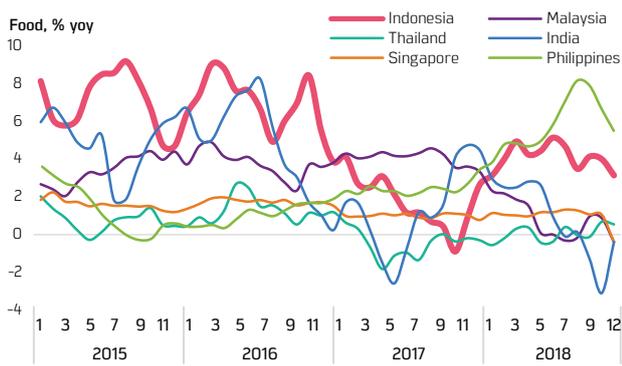
Sumber: CEIC, diolah



Grafik I.7. Inflasi Inti Indonesia dan Kawasan

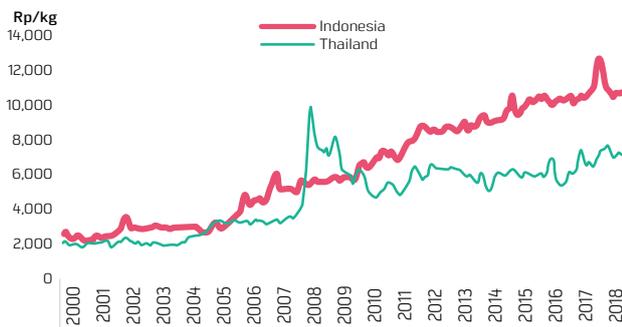
Sumber: CEIC, diolah

Hal yang serupa juga terjadi pada komponen inflasi pangan (food) Indonesia yang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dalam empat tahun terakhir, inflasi *food* Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, kecuali Filipina sejak tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari tingkat harga pangan domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga global.



Grafik I.8. Inflasi Pangan Indonesia dan Kawasan

Sumber: CEIC, diolah



Sumber: Bulog
Indonesia: beras jenis IR1 di Pasar Induk Beras Cipinang
Thailand: Beras Thai Broken 5% di Pasar Induk beras Cipinang

Grafik I.9. Harga Beras Indonesia dan Thailand

Sumber: Bulog, diolah

Harga pangan domestik Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan harga global.

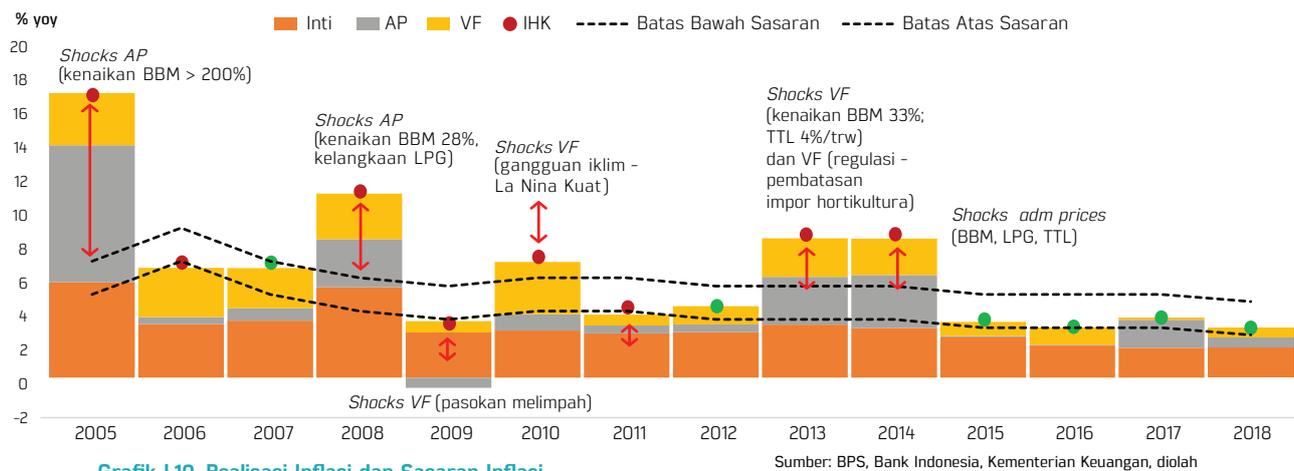
Untuk beras, harga domestik dapat mencapai kisaran 70 persen lebih tinggi dibandingkan harga global. Pada tahun 2000an, harga beras domestik masih relatif sama dengan harga beras Thailand. Tren peningkatan harga beras domestik dimulai pada tahun 2010 ditandai dengan peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selanjutnya, harga beras terus mengalami tren meningkat dan perbedaan dengan harga global semakin melebar. Hal serupa juga terjadi pada komoditas pangan lainnya, seperti bawang merah dan daging sapi, bahkan perbedaan harga daging sapi domestik dengan global sempat mencapai 120 persen lebih tinggi. Untuk itu, pengendalian inflasi masih memerlukan perhatian lebih, khususnya untuk komponen *volatile food*.

Untuk itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan sasaran laju inflasi dengan tren menurun sebagai strategi mengarahkan tingkat inflasi pada level yang rendah dalam rangka menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi tahun 2019 telah ditetapkan pada sasaran $3,5\% \pm 1,0\%$ dan menurun di $3,0\% \pm 1,0\%$ di tahun 2020 dan 2021. Sebelumnya, sasaran inflasi 2018 telah ditetapkan sebesar $3,5\% \pm 1,0\%$. Tren penurunan tersebut diharapkan dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang rendah dan stabil. Sasaran inflasi yang rendah dan stabil pada akhirnya diharapkan dapat menjadi acuan (*anchor*) dalam membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat untuk tiga tahun ke depan sehingga dapat mendukung perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, laju inflasi bergerak pada kisaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian laju inflasi yang terkendali ini perlu tetap dipertahankan di periode 2019 - 2021 dengan target yang lebih rendah (*challenging*) dalam rangka menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi. Secara historis, beberapa faktor yang menyebabkan laju inflasi berada di luar sasaran karena inflasi pangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Selain itu, faktor lainnya adalah dampak jangka pendek dari kebijakan *administered prices*, terutama kebijakan harga energi.



Grafik I.10. Realisasi Inflasi dan Sasaran Inflasi

Untuk itu, dalam rangka menciptakan strategi pencapaian laju inflasi sesuai dengan sasaran diperlukan pemutakhiran peta jalan sebagai panduan dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian inflasi. Panduan ini disusun secara lebih terstruktur dan terintegrasi antara kebijakan pusat dan daerah. Penyusunan panduan ini juga telah merujuk dan mempertimbangkan evaluasi dari Peta Jalan Pengendalian Inflasi Periode 2016 – 2018. Dalam penyusunan peta jalan ini, telah dilakukan proses penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Untuk mencapai sasaran inflasi ke depan, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua institusi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada 26 Juli 2018 untuk menjaga inflasi agar dapat bergerak pada level yang rendah dan stabil serta untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

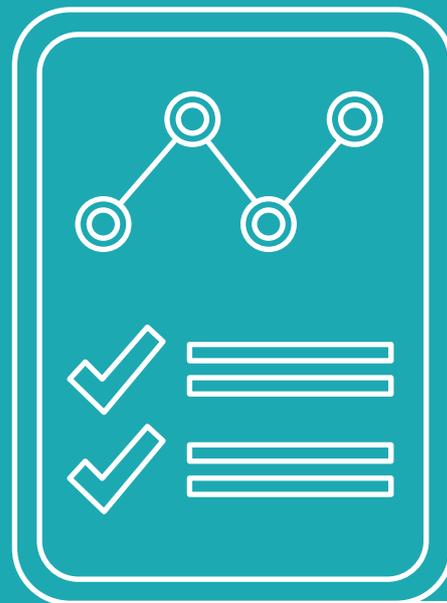
Terkait dengan inflasi, Presiden mengarahkan agar upaya-upaya dalam pengendalian inflasi difokuskan pada aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Ketersediaan pasokan akan menjamin tercukupinya barang kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, ketersediaan pasokan tidak lepas dari dua faktor, yaitu sisi produksi dan distribusi. Perbaikan sisi produksi terus diupayakan untuk menjamin kemampuan domestik memenuhi permintaan dalam negeri. Kemampuan memproduksi barang kebutuhan tersebut juga perlu didukung dengan proses arus distribusi barang dan jasa yang lancar guna menjamin penyebaran barang kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh daerah. Salah satu

permasalahan yang masih dihadapi pasar Indonesia adalah strukturnya yang masih belum sempurna dan masih terdapat celah inefisiensi dalam rantai distribusi. Untuk itu, pengawasan proses distribusi perlu disertai dukungan dari para penegak hukum, termasuk kepolisian sebagai langkah antisipasi terjadinya praktik permainan harga dan penimbunan berlebihan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan harga barang yang lebih wajar dan rasional. Dalam hal upaya menjaga ketersediaan pasokan, juga diperlukan kerjasama perdagangan antardaerah, terutama daerah surplus dan defisit supaya dapat mencegah terjadinya gejolak harga yang berlebihan di masing-masing daerah melalui koordinasi antardaerah yang tergabung dalam wadah TPID. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan juga pembangunan infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan pasar-pasar pengumpul di daerah serta pembangunan pasar induk di daerah sentra untuk mengurangi biaya distribusi/transportasi.

Bab
02

Evaluasi
Peta Jalan
Pengendalian
Inflasi
2015 – 2018



Infografis Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018

INFLASI IHK 2015-2018 DALAM KISARAN SASARAN (3,35%; 3,02%; 3,61%; 3,13%* (YOY))
 INFLASI VF RAMADHAN 2015-2018 MENURUN (1,74%; 1,71%; 0,91%; 0,19% (MTM))

		 IHK	 INTI	 VOLATILE FOOD	 ADMINISTERED PRICES
2015 - 2018 (Sasaran)*	2015	4,0%±1%	4,3%±1%	4,1%±1%	3,0%±1%
	2016	4,0%±1%	4,3%±1%	4,1%±1%	3,0%±1%
	2017	4,0%±1%	4,3%±1%	4,1%±1%	3,0%±1%
	2018	3,5%±1%	3,5%±1%	4,0%±1%	3,0%±1%
2015 - 2018 (Realisasi)	2015	3,35%	3,95%	4,84%	0,39%
	2016	3,02%	3,07%	5,92%	0,21%
	2017	3,61%	2,95%	0,71%	8,70%
	2018	3,13%	3,07%	3,39%	3,36%

*Peraturan Menteri Keuangan hanya mengatur sasaran inflasi untuk IHK

	 INFLASI INTI 	 INFLASI VOLATILE FOOD 	 INFLASI ADMINISTERED PRICES 
	"Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti telah terlaksana dengan baik"	"Peta Jalan Pengendalian Inflasi Volatile Food terkait Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi masih perlu mendapat perhatian"	"Peta Jalan pengendalian inflasi Administered Prices masih perlu mendapat perhatian"
Capaian Peta Jalan 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> PDB Aktual terjaga di sekitar PDB Potensial melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan permintaan Pembangunan infrastruktur konektivitas Ekspektasi inflasi menurun dan di sekitar sasaran inflasi Volatilitas Nilai Tukar Rupiah terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kelembagaan petani meningkat PDB hortikultura meningkat Kebijakan stabilisasi harga di tingkat konsumen semakin meningkat Akses informasi pangan kepada petani membaik 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan konsumsi BBM subsidi dan non-subsidi Kewajiban pemanfaatan bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM Pelaksanaan subsidi tepat sasaran TTL daya 900 VA non subsidi
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> Output Gap menyempit Volatilitas Nilai Tukar Rupiah rentan oleh kondisi global Akurasi statistik (antara lain tarif pulsa ponsel) 	<ul style="list-style-type: none"> PDB tanaman pangan melambat Faktor siklikal beberapa komoditas pangan strategis masih kuat Pasokan bawang merah dan cabai di pasar induk dalam tren menurun Disparitas inflasi pangan antar daerah masih terjadi Akurasi data pangan Kebijakan harga dan pasokan yang sulit dipenuhi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi produksi Kelanjutan reformasi subsidi energi Pengendalian konsumsi BBM melalui pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) Akurasi statistik (antara lain tarif angkutan udara)

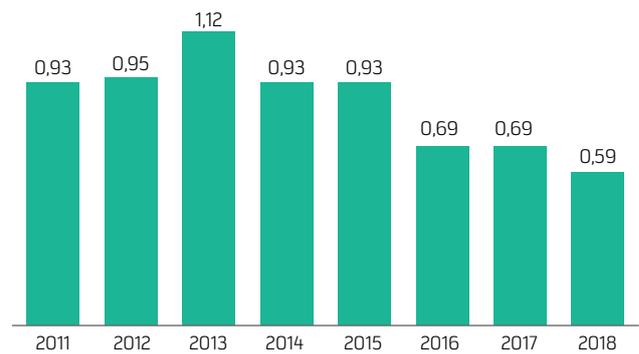
Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2015-2018

Realisasi inflasi telah berhasil dijaga pada rentang sasaran dalam empat tahun terakhir. Realisasi inflasi pada 2015 - 2018 masing-masing sebesar 3,35% (yoy), 3,02% (yoy), 3,61% (yoy), dan 3,13% (yoy). Pencapaian realisasi pada empat tahun terakhir tersebut berada pada sasaran yang ditetapkan sebesar $4\% \pm 1\%$ pada tahun 2015 - 2017 dan $3,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2018. Hal ini didasarkan pada pencapaian realisasi inflasi 2018 sebesar 3,13% (yoy).

Tercapainya sasaran inflasi secara berturut-turut pada empat tahun terakhir didukung oleh terkendalinya inflasi inti dan *volatile food* serta minimalnya kebijakan *administered prices*. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terkelolanya faktor domestik dan dukungan positif faktor global. Selain itu, pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Koordinasi pengendalian inflasi kedepan telah diperkuat melalui Keppres No 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Dalam rangka mendukung stabilitas harga, pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan selama empat tahun terakhir. Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan antara lain meliputi pembangunan jalan tol yang bertambah 310 km yang berdampak pada menurunnya biaya logistik karena mempercepat waktu tempuh; pembangunan 5 bandara baru; pembangunan 410 pelabuhan baru untuk mendukung program tol laut; dan pembangunan 366.404 jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan.

Terjaganya inflasi juga tercermin pada perkembangan harga di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Laju inflasi pada masa HBKN mengalami tren yang menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan semakin terkendalinya harga barang terutama harga pangan pokok. Penurunan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan melalui kebijakan dalam menjaga ketersediaan pasokan seperti operasi pasar, pasar murah, dan pengawasan distribusi yang juga melibatkan para penegak hukum untuk mengantisipasi terjadinya praktik permainan harga. Ke depan, laju inflasi pada masa HBKN akan terus dijaga pada tren yang menurun.

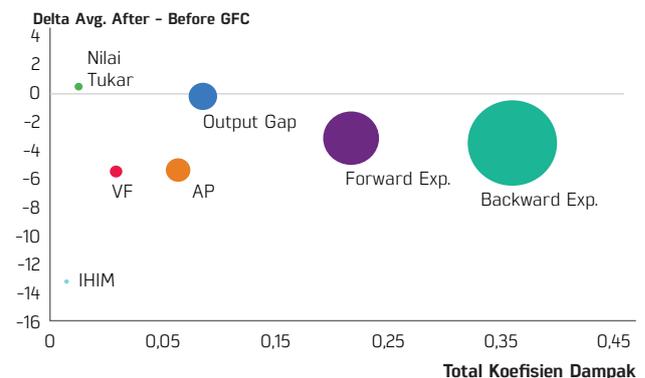
Inflasi inti dalam empat tahun terakhir (2016-2018) berada di sekitar 3% (yoy), lebih rendah dari rata-rata jangka panjangnya (2002 - 2018) sebesar 5,46% (yoy). Dari domestik, ekspektasi inflasi terjaga di sekitar sasaran inflasi berkat terjaganya kredibilitas kebijakan makro dan terkelolanya permintaan domestik di sekitar output potensial. Hal ini selanjutnya berpengaruh terhadap rendahnya transmisi



Grafik II.1. Realisasi Inflasi HBKN (mtm)

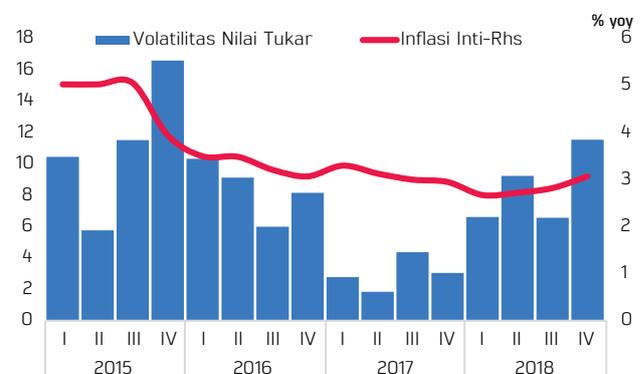
Sumber: BPS, diolah

dari pelemahan rupiah terhadap harga di tingkat konsumen serta turunnya dampak lanjutan dari *shocks* inflasi *volatile food* dan *administered prices* terhadap komoditas lainnya. Dari global, pada periode ini terjadi tren penurunan harga komoditas global yang berpengaruh terhadap penurunan inflasi inti. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan pada 2015 dan 2018 namun volatilitas dapat terjaga dan bahkan mengalami tren penurunan sehingga berpengaruh terhadap rendahnya transmisi ke harga konsumen.



Grafik II.2. Perkembangan Determinan Inflasi Inti

Sumber: Bank Indonesia



Grafik II.3. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia



Gambar II.1. Timeline Kebijakan Energi 2014 - 2018

Inflasi *volatile food* pada tiga tahun terakhir (2016–2018) secara rata-rata berada di bawah 5% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata jangka panjangnya (2002–2018) sebesar 8,70% (yoy). Menurunnya inflasi VF dalam 3 tahun terakhir (2016–2018) mencerminkan upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, dan meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Dari sisi domestik, rendahnya inflasi *volatile food* ditengarai oleh: (i) terjadinya panen raya di luar pola musiman berdampak pada terbatasnya inflasi beras di tengah kuatnya El Nino; serta (ii) terjadinya deflasi cukup besar pada komoditas utama yang bergantung pada cuaca (a.l aneka cabai dan bawang merah) pada 2015 dan 2017. Kenaikan komoditas utama seperti aneka cabai dan bawang yang signifikan pada periode ini terjadi pada 2016 disebabkan oleh permasalahan pasokan akibat curah hujan yang tinggi dan serangan hama atau virus di sejumlah daerah sentra produksi seperti Sumatera Utara. Namun, kondisi ini dapat tertahan oleh berkurangnya tekanan harga komoditas lain khususnya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi. Harga beberapa komoditas tersebut masih bisa dikendalikan seiring terjaganya pasokan dan cukup intensifnya kebijakan Pemerintah melalui operasi pasar. Dari sisi global, rendahnya harga CPO dunia pada awal 2015 berkontribusi pada terjaganya inflasi komoditas minyak goreng domestik.

Inflasi *administered price* pada tiga tahun terakhir (2016–2018) secara rata-rata juga berada di bawah 5% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata jangka panjangnya (2002–2018) sebesar 9,65% (yoy). Realisasi yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh tren harga minyak mentah yang menurun sejak pertengahan tahun 2014. Sementara itu dari sisi domestik, kebijakan reformasi subsidi energi turut serta meminimalisasikan tekanan inflasi *administered prices*, dimulai dari koreksi terhadap harga BBM. Selain itu, penurunan harga ini juga terlihat pada tarif listrik dan tarif angkutan udara.

Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti 2015–2018

Secara umum, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti 2015–2018 telah terlaksana dengan baik. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti 2015–2018 meliputi beberapa indikator. Pertama, mengelola ekspektasi inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi. Kedua, mengelola permintaan sesuai kapasitas ekonomi. Ketiga, mengelola volatilitas nilai tukar rupiah.

Terlaksananya Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti tercermin dari laju inflasi inti yang terjaga di level 3% (yoy). Implementasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti menghasilkan ekspektasi inflasi yang berada dalam tren menurun dan terjangkau dalam sasaran inflasi. Hal tersebut terlihat pada menurunnya tingkat ekspektasi inflasi 24 bulan sejak 2009 dan diperkirakan mencapai 4,4% (yoy) pada tahun 2018 serta tren menurunnya ekspektasi inflasi 12 bulan pada 2015 dan diperkirakan mencapai 3,6% (yoy) pada tahun 2018. Selanjutnya, pelaksanaan peta jalan juga berhasil menjaga Produk Domestik Bruto (PDB) aktual berada di sekitar PDB potensial sebagaimana tercermin dari *output gap* yang masih negatif. Lebih lanjut, Pemerintah juga meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur konektivitas. Implementasi Peta Jalan juga menghasilkan nilai tukar rupiah yang terjaga hingga akhir 2017.

Ke depan, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Inti dihadapi oleh beberapa tantangan. *Output gap* diperkirakan akan menyempit seiring penguatan permintaan domestik. Menguatnya permintaan domestik juga mendorong peningkatan impor yang disertai dengan penguatan dolar AS menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Isu lain yang berkembang terkait pengendalian inflasi inti salah satunya adalah keakuratan statistik pada tarif pulsa

ponsel. Upaya perbaikan akurasi statistik tersebut telah dimulai pada tahun 2018 melalui koordinasi TPIP bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penghimpun data dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai otoritas penyedia data terkait tarif pulsa ponsel.

Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Administered Prices 2015-2018

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Administered Prices telah terlaksana cukup baik. Pemerintah berhasil mengelola konsumsi BBM subsidi melalui pengalihan kepada BBM non subsidi. Porsi konsumsi BBM non subsidi dalam total konsumsi BBM mengalami peningkatan pada tahun 2017. Selanjutnya, berdasarkan Perpres No. 43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran BBM, Pemerintah dapat menetapkan: i) distribusi bensin premium di Jamali; ii) harga jual bensin premium di non Jamali dan solar berbeda dari formula; serta iii) kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Pertamina akibat perbedaan harga jual dengan keekonomian. Pemerintah juga mewajibkan pemanfaatan bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM berdasarkan Permen ESDM 25 Tahun 2013 sehingga diharapkan

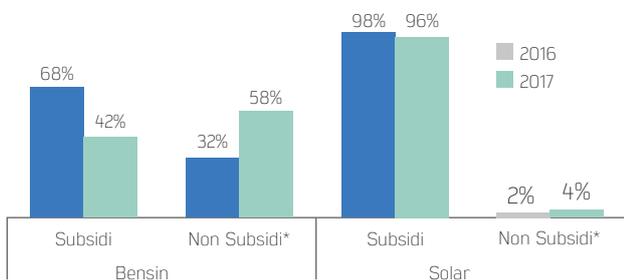
dapat mengurangi impor BBM. Selain itu, Pemerintah juga melaksanakan subsidi tepat sasaran terhadap tarif listrik daya 900 VA pada tahun 2017.

Ke depan, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Administered Prices dihadapi oleh beberapa tantangan.

Tantangan tersebut berupa peningkatan efisiensi produksi energi (PLN dan Pertamina), kelanjutan reformasi subsidi energi (sesuai keekonomian dan tepat sasaran) serta pengendalian konsumsi BBM melalui pemanfaatan BBG (Bahan Bakar Gas) dan BBN (Bahan Bakar Nabati). Isu lain yang berkembang terkait pengendalian inflasi *administered prices* salah satunya adalah keakuratan perhitungan inflasi tarif angkutan udara. Upaya perbaikan akurasi statistik tersebut telah dimulai pada tahun 2018 melalui koordinasi TPIP bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penghimpun data dan Kementerian Perhubungan sebagai otoritas penyedia data terkait tarif angkutan udara.

Evaluasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Volatile Food 2015-2018

Secara umum, kebijakan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Volatile Food telah diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Dalam empat tahun terakhir, inflasi *volatile food* cenderung di atas 3% (yoy), kecuali tahun 2017 (0,71%, yoy). Tingginya inflasi *volatile food* masih dipengaruhi oleh kuatnya faktor siklikal beberapa komoditas pangan strategis terutama komoditas holtikultura (aneka bawang, aneka cabai, daging dan telur ayam ras). Permasalahan lain adalah tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru serta meningkatnya *input cost*. Misalnya kenaikan daging ayam ras dan telur ayam ras biasanya dipicu instabilitas pasokan jagung yang merupakan bahan baku pakan. Masih diperlukan *extra effort* untuk menjaga inflasi *volatile food* sesuai arahan *High Level Meeting* TPIP pada 2017-2018 yakni di kisaran 4%-5% (yoy).



*Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo
** Pertamina Dex, Dexlite

Grafik II.4. Porsi Volume Konsumsi BBM
Sumber: Pertamina, diolah

	Kebijakan	Implementasi	
Subsidi Energi	BBM - Premium	Market Price sejak 1 Januari 2015	Tidak ada perubahan harga sejak 1 April 2016
	BBM - Solar	<ul style="list-style-type: none"> Market Price dengan fixed subsidi Rp1000/l sejak 1 Januari 2015 Market Price dengan fixed subsidi Rp500/l sejak 1 Juli 2016 	Tidak ada perubahan harga sejak 1 April 2016 dengan fixed subsidi Rp500/l sejak 1 Juli 2016
	LPG - LPG 3 kg	Fixed price dengan floating subsidi sejak 2007	
	TTL - TTL RT	<ul style="list-style-type: none"> Tariff adjustment untuk daya 1300VA ke atas sejak 2014 Subsidi tepat sasaran untuk daya 900VA sejak Januari 2017 	Tidak ada tariff adjustment sejak Januari 2017 untuk daya 1300VA ke atas dan sejak Juli 2017 untuk daya 900VA non subsidi

Grafik II.5. Kebijakan Administered Prices

Sumber: Kementerian ESDM dan PLN, diolah

Upaya pengendalian inflasi *volatile food* telah dilakukan melalui beberapa kegiatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan mencakup penguatan kelembagaan petani; pemberian bantuan sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian; pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah; fasilitasi kerjasama antara produsen dan importir; kebijakan impor pangan; antisipasi terhadap El Nino maupun El Nina; dan peningkatan akses informasi harga baik ditingkat konsumen maupun produsen. Kerjasama dengan produsen dan importir adalah berupa pengadaan komoditas pangan dengan harga murah kepada konsumen terutama pada saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara itu kebijakan impor komoditas pangan meliputi impor daging sapi beku, sapi bakalan, daging kerbau dan beras. Impor daging sapi beku dan sapi bakalan ditujukan untuk meningkatkan pasokan daging sapi di dalam negeri. Kebijakan impor daging kerbau ditujukan untuk memberikan alternatif pilihan sumber protein selain daging sapi kepada masyarakat dan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi. Kebijakan impor beras dikeluarkan pada awal tahun 2018 untuk merespon kenaikan harga beras secara persisten sejak September 2017.

Ke depan, pengendalian inflasi *volatile food* masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam hal upaya menjaga ketersediaan pasokan antar waktu, kerja sama perdagangan antardaerah sangat diperlukan. Daerah defisit membutuhkan barang atau komoditas dengan harga yang tidak terlalu tinggi, sedangkan daerah surplus perlu menjaga harga jual agar tidak terlalu rendah. Peran TPID menjadi penting mengingat TPID merupakan forum koordinasi data dan kebijakan antar dinas terkait kebijakan antar dinas terkait. Faktor utama yang perlu dilakukan oleh TPID untuk dapat melakukan kerjasama antardaerah adalah melakukan pemetaan komoditas surplus dan defisit di daerahnya. Dengan demikian, ketika kerjasama antar daerah telah terlaksana, hal tersebut tidak akan menimbulkan penyebab inflasi baru karena pasokan di daerah surplus menjadi tidak mencukupi untuk daerah surplus itu sendiri. Isu lain yang berkembang terkait pengendalian inflasi *volatile food* adalah: i) Peningkatan akurasi data pangan yang meliputi jumlah produksi, konsumsi, konversi, stok, serta pasokan. Terkait dengan data produksi, pada bulan Oktober 2018, BPS telah mengeluarkan perbaikan data produksi beras; ii) Harmonisasi data harga beras menurut kualitas sesuai Permendag No. 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan Permentan No. 31/2017 tentang kelas mutu beras.

Bab
03

Peta Jalan
Pengendalian
Inflasi
2019 – 2021



Infografis Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

Sasaran Inflasi



IHK*

2019 3,5%±1%

2020 3,0%±1%

2021 3,0%±1%

*Peraturan Menteri Keuangan hanya mengatur sasaran Inflasi untuk IHK

2019

2020

2021



INTI

2019 3,5%±1%

2020 3,0%±1%

2021 3,0%±1%



VF

2019 4,0%±1%

2020 3,25%±1%

2021 3,25%±1%



AP

2019 3,0%±1%

2020 2,75%±1%

2021 2,75%±1%

2019

GAP

2020-2021

- Rata-rata inflasi VF empat tahun terakhir 5,22% (yoy**), di atas arahan HLM TPIP 2017-2018 (4%-5%).
- Faktor sikikal** beberapa komoditas pangan strategis masih kuat.
- Inflasi domestik dan beberapa harga pangan domestik lebih tinggi dari negara sekitar.
- Masih terdapat disparitas harga/inflasi yang cukup besar antar provinsi.

- Keberlanjutan kebijakan harga energi domestik dihadapkan pada dampak inflasi AP dan daya beli masyarakat.
- Eksansi siklus ekonomi yang perlu disesuaikan dengan output potensialnya dan keterbatasan likuiditas global.
- Volatilitas nilai tukar diperkirakan tetap tinggi.

**Rata-rata Januari s.d. Desember

2019

Policy Direction

2020-2021

Mencapai IHK 3,5%±1%

- Menjaga stabilitas inflasi VF pada kisaran: 4-5%.

Mencapai IHK 3,0%±1%

- Menjaga inflasi VF tidak lebih dari 4%.
- Kebijakan inflasi AP memperhatikan sasaran inflasi IHK dan kesejahteraan/daya beli masyarakat.

Indikator Pencapaian

Hasil Gap Analysis

Program Strategis

Sub-Program Strategis

KETERJANGKAUAN HARGA

Penurunan rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi 10 komoditas pangan strategis*** berturut-turut dalam 2 tahun terakhir.

Inflasi dan volatilitas komoditas utama meningkat dalam 2 tahun terakhir kecuali daging sapi.

Stabilisasi Harga

Mengelola Permintaan

Sinkr. Perencanaan Program Pengendalian Inflasi
Opr. Psr/ Psr Mrh Nilai Tukar Konsumsi Output Gap

KETERSEDIAAN PASOKAN

- Rendemen beras lebih tinggi dari 63%.
- Tersedianya CPP, khusus beras menuju 1-1,5 juta ton.

- Rendemen beras 63%.
- CBP 232.754 Ton (2017).

Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan

Memperkuat Kelembagaan

Produktivitas ★ CPP ★
Kebijakan Impor ★
KUR SRG Kartu Tani
Asuransi Gapoktan

KELANCARAN DISTRIBUSI

Penurunan disparitas harga*** antara provinsi dengan rata-rata nasional (termasuk antar waktu).

Masih terdapat disparitas harga 10 komoditas utama antara provinsi dengan rata-rata nasional.

Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan

Model Bisnis & Pilot Project ★
Pasar Induk Beras ★
Digital Farming

KOMUNIKASI EFEKTIF

- Ekspektasi inflasi terjangkau dalam sasaran inflasi.
- Korelasi inflasi*** data PIHPS dengan data BPS minimal 0,8 dalam 1 tahun terakhir.
- Tingkat kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah meningkat.

- Ekspektasi inflasi terjangkau pada sasaran inflasi.
- 3 Komoditas memiliki korelasi ≤ 0,8.
- Hasil penilaian kinerja untuk TPID Non IHK masih rendah.

Memperbaiki Kualitas Data

Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

One Map Policy ★ PIHPS ★
Statistik Inflasi Produksi & Stok
Rekomendasi Kebijakan
Pembinaan TPID

★ : Flagship Program

***) Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir (indikator dalam PIHPS).

4K Analysis

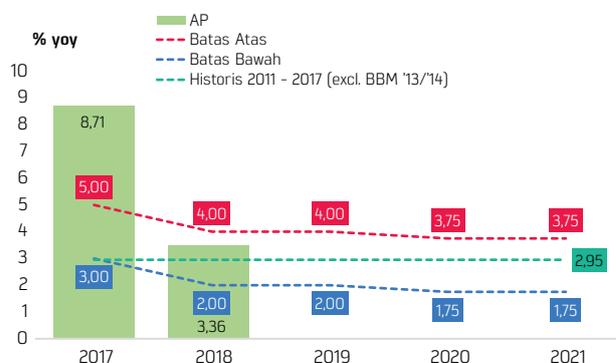
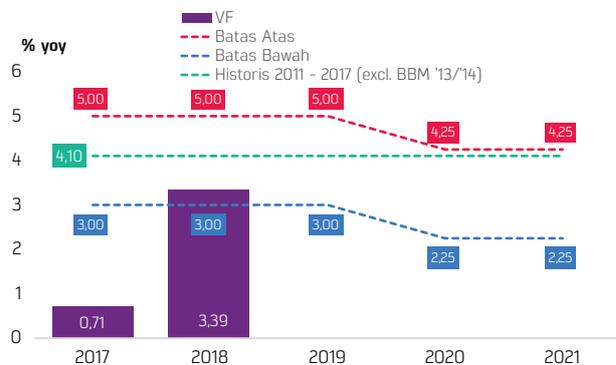
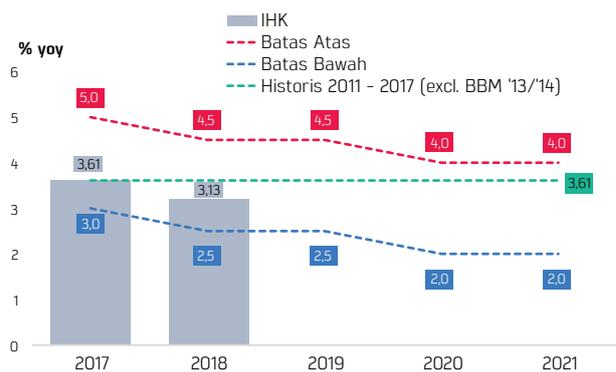
Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati usulan sasaran inflasi untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah masing-masing sebesar 3,5%, 3,0%, dan 3,0% dengan deviasi $\pm 1\%$. Sasaran inflasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017. Sasaran inflasi ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan a.l. **pertama**, pentingnya mempertahankan sasaran inflasi yang tidak lebih tinggi dari sasaran tahun-tahun sebelumnya dan sedikit menurun sebagai bentuk komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mengarahkan ekspektasi inflasi ke tingkat yang lebih rendah; **kedua**, dilaksanakannya berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian yang berdampak positif terhadap stabilitas harga dan mendorong daya saing perekonomian; **ketiga**, adanya penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

III. 1. Arah Kebijakan

Peta jalan pengendalian inflasi jangka menengah tahun 2019-2021 ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPIP baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran inflasi. Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut maka masing-masing komponen kelompok penyumbang inflasi harus dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun. Agar inflasi IHK tercapai sesuai sasarannya, inflasi inti, *volatile food* dan *administered price* masing-masing harus mencapai sekitar $3,5\% \pm 1\%$, $4,0\% \pm 1\%$ dan $3,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2019 serta $3,0\% \pm 1\%$, $3,25\% \pm 1\%$ dan $2,75\% \pm 1\%$ pada tahun 2020-2021. Tantangan pengendalian inflasi ke depan terutama bersumber dari domestik.

Tantangan pencapaian sasaran inflasi dari domestik bersumber dari kelompok pangan dan energi. Tantangan dari kelompok pangan terutama terjadi pada periode 2018 - 2019. Dengan implementasi Peta Jalan, diharapkan pada akhir 2019 inflasi *volatile food* sudah lebih terkendali. Tantangan selanjutnya pada tahun 2020 - 2021 terutama bersumber dari kelompok *administered prices* berupa keberlanjutan penyesuaian harga energi domestik di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, ekonomi domestik diperkirakan terus menguat sehingga perlu diimbangi penguatan output potensial agar inflasi tetap terkendali.

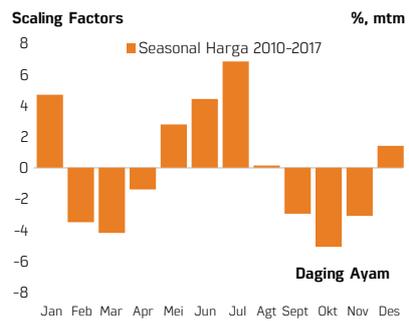


Grafik III.1. Rata-rata Historis dan Sasaran Inflasi IHK, Inti, Volatile Food, dan Administered Price

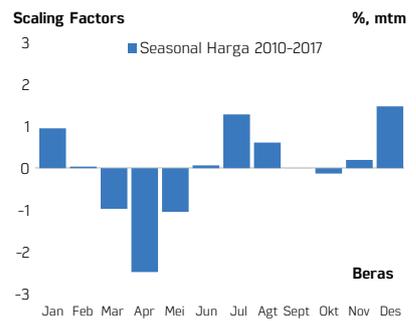
Sumber: BPS dan Bank Indonesia



Grafik III.2. Faktor Musiman Komoditas Bawang Merah
Sumber: Bank Indonesia



Grafik III.3. Faktor Musiman Komoditas Daging Ayam Ras
Sumber: Bank Indonesia



Grafik III.4. Faktor Musiman Komoditas Beras
Sumber: Bank Indonesia

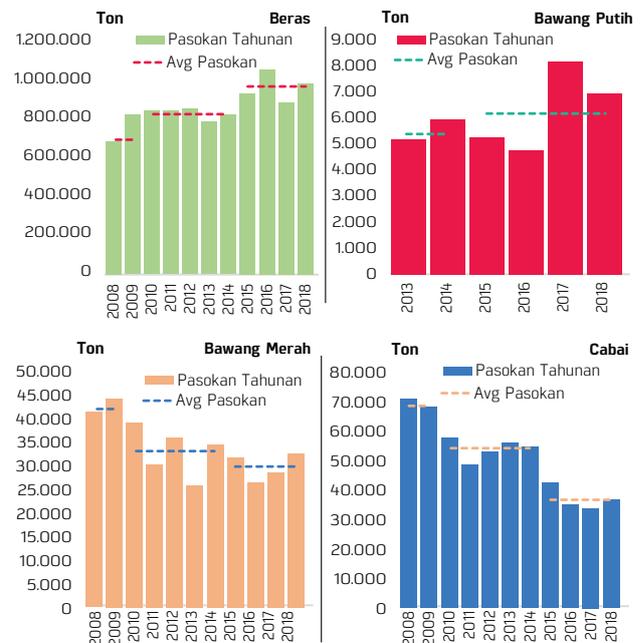
Dari kelompok pangan, inflasi *volatile food* masih menghadapi sejumlah tantangan. Rata-rata inflasi volatile food sepanjang empat tahun terakhir (2015-2018) adalah sebesar 5,22% (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dari kisaran inflasi volatile food yang disepakati dalam forum *High Level Meeting TPIP* pada 22 Januari 2018 yaitu sebesar 4% - 5% (yoy). Masih terdapat tantangan pengendalian inflasi pada kelompok ini tercermin dari masih terdapatnya disparitas harga dan inflasi antar waktu, antar wilayah dan antar pelaku.

Permasalahan disparitas inflasi antar waktu bersumber baik dari konsumsi maupun pasokan. Inflasi beberapa komoditas pangan utama akan meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ketika konsumsi meningkat maupun pada periode musim tanam. Adanya permasalahan keterbatasan teknologi penyimpanan juga turut berkontribusi pada tingginya inflasi. Komoditas pangan yang bersifat *perishable* seperti aneka bawang, aneka cabai, daging dan telur ayam ras memiliki faktor musiman yang lebih kuat. Sementara itu, untuk komoditas pangan strategis lainnya, seperti beras, minyak goreng, jagung, gula dan kedelai, inflasi juga disebabkan oleh keterbatasan produksi dalam negeri. Secara umum pasokan di pasar induk mengalami tren peningkatan untuk beras dan daging sapi, sementara bawang merah dan cabai dalam tren menurun.

Permasalahan disparitas inflasi antar wilayah bersumber dari karakteristik daerah dan aspek distribusi. Beberapa daerah merupakan daerah surplus pangan karena merupakan sentra produksi sementara daerah lainnya adalah daerah defisit pangan karena tidak memiliki sentra produksi pangan. Secara umum, asesmen inflasi spasial mengkonfirmasi daerah sentra produksi sebagai daerah surplus dengan inflasi yang lebih rendah dari potensinya. Namun terdapat daerah sentra produksi yang terindikasi sebagai daerah defisit/*balanced* dengan inflasi yang lebih tinggi/sesuai dari potensinya. Misalkan Jawa Tengah yang merupakan sentra produksi untuk

padi terindikasi sebagai daerah defisit sementara untuk cabai merah dan bawang merah terindikasi *balanced* akibat perdagangan antar daerah¹.

¹ MHA Ridhwan, et.all "Analisis Status Ketahanan Pangan Di Indonesia Dengan Aplikasi Model Data Panel Spasial", Working Paper Bank Indonesia, Desember 2012



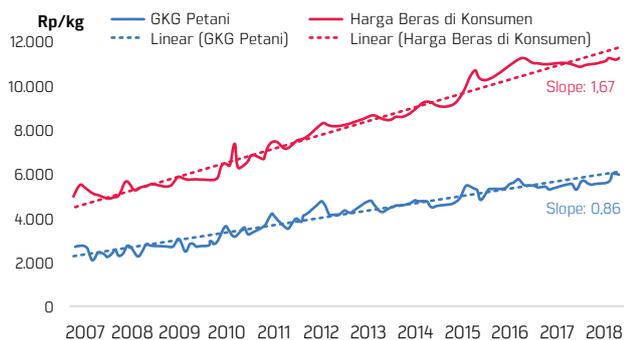
Grafik III.5. Pasokan Di Pasar Induk
Sumber: BPS, diolah



Gambar III.1. Peta Inflasi Beras Daerah Surplus/Defisit
Sumber: Ridhwan et.all, 2012

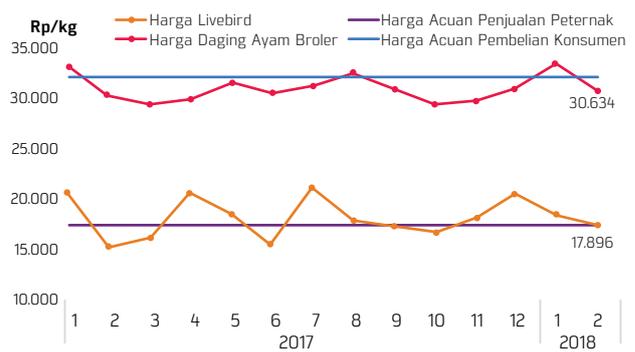
Permasalahan disparitas inflasi antar pelaku disebabkan oleh panjangnya rantai perdagangan dan struktur pasar². Panjangnya mata rantai perdagangan pada komoditas beras dan struktur pasar yang cenderung oligopolistik berdampak pada disparitas harga beras. Rantai perdagangan beras cukup panjang yakni dari produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen. Selain itu, ada indikasi bahwa pedagang memiliki *market power*, sehingga pedagang lebih dominan dalam menentukan harga baik harga di level produsen maupun konsumen, dan mendapatkan margin keuntungan terbesar. Untuk komoditas cabai merah, struktur pasar cabai merah monopolistik di tingkat petani, pedagang besar, dan mengarah ke oligopoli di tingkat pedagang grosir. Rantai perdagangan cabai merah juga cukup panjang, dari produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen. Dalam struktur pasar komoditas bawang merah, pedagang lebih dominan dalam menentukan harga jual yang tercermin dari metode penentuan harga jual yang mayoritas menjawab mengikuti harga pasar tertinggi/pesaing. Adapun rantai perdagangan bawang merah terdiri produsen, pengumpul, pedagang besar, grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen. Untuk komoditas daging sapi, struktur pasar daging sapi monopolistik di tingkat Petani hingga pedagang besar, dan mengarah ke oligopoli di tingkat Pedagang grosir. Rantai perdagangan daging sapi tertutup dalam wilayah propinsi yang sama. Dibandingkan produk pertanian, rantai perdagangan sapi relatif lebih pendek.

² Tumpak et.al , "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah serta Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Harga Komoditas Daerah", 2011



Grafik III.6. Disparitas Harga Gabah dan Beras

Sumber: CEIC dan Kemendag, diolah

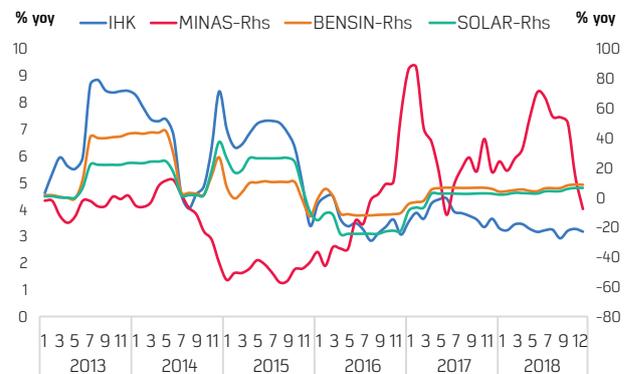


Grafik III.7. Disparitas Harga Daging Ayam Ras Peternak dan Konsumen

Sumber: Kemendag, diolah

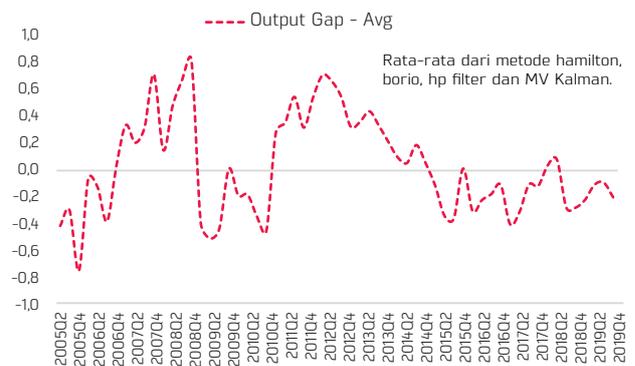
Dari kelompok energi, tantangan pengendalian inflasi bersumber dari kebijakan penyesuaian harga energi domestik.

Harga minyak dunia mengalami tren peningkatan sejak tahun 2015 meski sempat mengalami penurunan selama beberapa bulan pada awal tahun 2017. Sementara itu inflasi IHK kembali mengalami tren perlambatan sejak tahun 2015 terutama karena ditahannya harga BBM subsidi sejak April 2016 dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi domestik. Seiring prospek pemulihan ekonomi ke depan, maka terdapat potensi penyesuaian harga energi yakni dari BBM, LPG 3 kg, dan TTL dalam rangka melanjutkan kebijakan subsidi tepat sasaran.



Grafik III.8. Inflasi IHK dan Harga Minyak Dunia

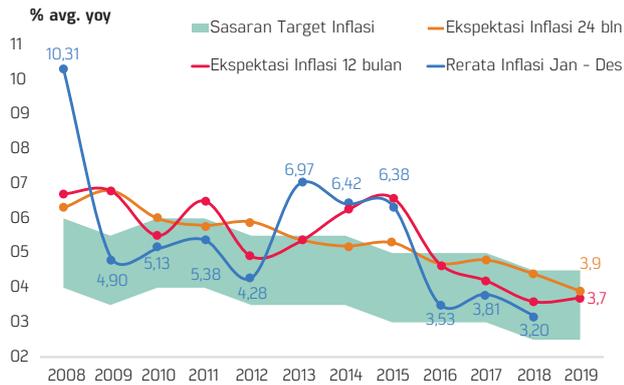
Sumber: Bloomberg dan BPS, diolah



Grafik III.9. Output Gap Indonesia

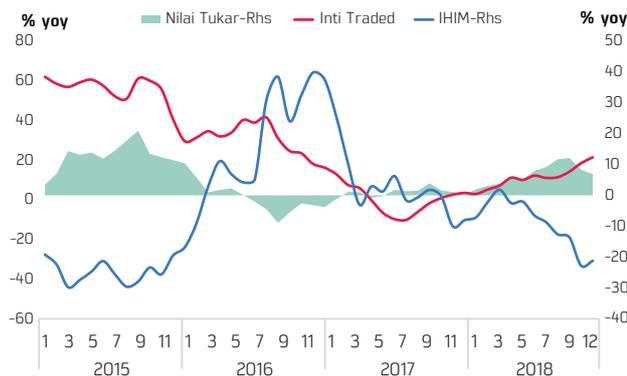
Sumber: Bank Indonesia

Tantangan lain dari domestik bersumber dari dinamika perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan menguat sehingga berpotensi memberikan tekanan pada inflasi inti. Untuk itu, agar sasaran inflasi tetap tercapai, perlu direspon dengan peningkatan kapasitas perekonomian yang memadai serta pengelolaan permintaan melalui kebijakan moneter. Selain itu, ekspektasi inflasi perlu terus dijaga agar tetap terjangkau dalam sasaran inflasi.



Grafik III.10. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi

Sumber: Consensus Forecast, diolah



Grafik III.11. Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Inti Traded

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah

Tantangan dari eksternal diperkirakan berkurang sejalan dengan perbaikan perekonomian global yang masih moderat. Perekonomian global pada 2019 - 2020 diperkirakan tumbuh stabil sebesar 3,7% (yoy)³ sama dengan 2018. Sejalan dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global diperkirakan masih rendah. Hal ini dapat berdampak pada defisit neraca transaksi berjalan dan selanjutnya pada stabilitas nilai tukar. Meskipun demikian, rendahnya inflasi komoditas global juga berpotensi menurunkan tekanan dari *input cost*.

Ditengah berbagai tantangan yang dihadapi, HLM TPIP telah memberikan beberapa arahan (Policy Direction) untuk mencapai sasaran inflasi 2019 - 2021. Untuk tahun 2018 - 2019, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi *volatile food* pada kisaran 4 - 5% (yoy). Selanjutnya untuk tahun 2020 - 2021, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk stabilitas inflasi *administered prices* dengan memperhatikan sasaran inflasi IHK dan kesejahteraan/ daya beli masyarakat serta menjaga inflasi *volatile food* tidak lebih dari 4% (yoy). Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui empat strategi utama (*key strategies*) yang disebut sebagai 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Strategi utama tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui beberapa program strategis dan sub program strategis.

3 Angka pertumbuhan PDB riil Dunia berdasarkan WEO - IMF Oktober 2018.

OUTCOME	OUTPUT	GAP	POLICY DIRECTION	KEY STRATEGIES
2018-2019				
IHK 3,5±1%	CORE 3,5±1% AP 3±1% VF 4±1%	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata inflasi VF empat tahun terakhir (2015-2018) 5,22% (yoy), di atas arahan HLM TPIP 2017-2018 (4% - 5%) Faktor musiman beberapa komoditas pangan strategis (aneka bawang, aneka cabai, daging dan telur ayam ras) masih kuat. Inflasi domestik dan beberapa harga pangan domestik lebih tinggi dari negara sekitar. Masih terdapat disparitas harga/inflasi yang cukup besar antar provinsi 	Menjaga stabilitas Inflasi VF pada kisaran 4-5%	4K Keterjangkauan Harga Ketersediaan Pasokan
2020-2021				
IHK 3,5+1%	CORE 3±1% AP 2,75±1% VF 3,25±1%	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan kebijakan harga energi domestik dihadapkan pada dampak inflasi AP dan daya beli masyarakat. Ekspansi siklus ekonomi yang perlu disesuaikan dengan output potensialnya dan keterbatasan likuiditas global. Volatilitas nilai tukar diperkirakan tetap tinggi. 	Kebijakan Inflasi AP memperhatikan sasaran inflasi IHK dan kesejahteraan/daya beli masyarakat Inflasi VF tidak lebih dari 4%	Kelancaran Distribusi Komunikasi Efektif

Gambar III.2. Policy Direction Pengendalian Inflasi 2018 - 2021

III. 2. Gap Analysis Strategi Utama 4K

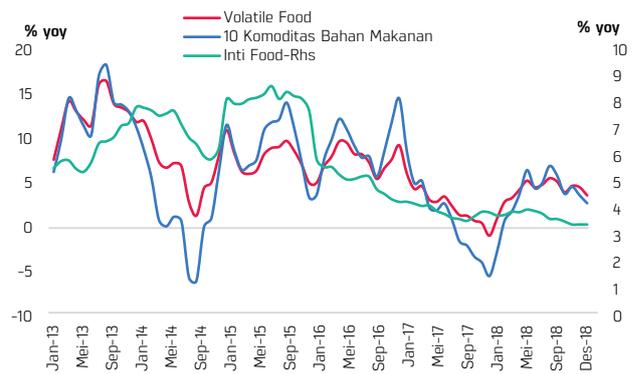
Masing-masing strategi utama memiliki indikator keberhasilan. Untuk strategi **Keterjangkauan Harga**, indikator keberhasilan adalah penurunan inflasi dan volatilitas inflasi sepuluh komoditas pangan strategis berturut-turut dalam dua tahun terakhir. Sepuluh komoditas strategis tersebut adalah Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, dan Gula Pasir⁴. Sepuluh komoditas strategis tersebut mencapai 8,99% dari bobot inflasi IHK pangan⁵. Untuk strategi **Ketersediaan Pasokan**, indikator keberhasilan adalah peningkatan rendeman beras dari level saat ini sebesar 63%⁶ sebagai *proxy* peningkatan produksi beras serta ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) utamanya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 – 1,5 juta ton⁷. Untuk strategi **Kelancaran Distribusi**, indikator keberhasilan adalah penurunan disparitas harga sepuluh komoditas pangan strategis antara level provinsi dengan level nasional serta disparitas harga antar waktu. Untuk strategi **Komunikasi Efektif**, indikator keberhasilan mencakup: (1) ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran inflasi; (2) akurasi informasi yang dicerminkan melalui korelasi inflasi sepuluh komoditas pangan strategis yang diperoleh dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan data yang dikeluarkan oleh BPS adalah minimal sebesar 0,8 dalam satu tahun terakhir; dan (3) tingkat kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah meningkat.

⁴ Pemerintah menetapkan seluruh komoditas tersebut kecuali bawang putih sebagai Barang Kebutuhan Pokok (Perpres No.71/2015 tentang Penetapan & Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting). Lebih lanjut, Pemerintah menugaskan BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan & stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen & produsen untuk sembilan komoditas tersebut sebagaimana tertuang dalam Perpres No.48/2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Ke sepuluh komoditas tersebut juga merupakan komoditas yang dipantau dalam PIHPS.

⁵ Mencakup inti pangan dan *volatile food*. Total pangsa inflasi pangan terhadap IHK adalah sebesar 20,36%

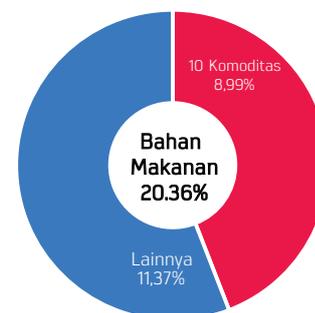
⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. Angka tersebut merupakan hasil dari Survei Susut Panen dan Pasca Panen Gabah/Beras yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian tahun 2005 hingga 2007 yang diintegrasikan.

⁷ Angka ini adalah hasil Rakortas Pangan 28 Maret 2018. Berdasarkan kriteria FAO, Cadangan Beras Pemerintah adalah sebesar 3%-5% dari konsumsi atau setara 900 ribu ton-1,5 juta ton dengan asumsi konsumsi beras sebesar 30,37 juta ton (Neraca Pangan Kementan, 2018). Berdasarkan Kajian Dewan Ketahanan Pangan, 2013, CBP sebesar 1,5-1,8 juta ton. Ke depan akan dimonitor untuk jenis pangan lainnya.



Grafik III.12. Inflasi Inti Food, Volatile Food dan 10 Komoditas Pangan Strategis

Sumber: BPS, diolah



10 Komoditas = Beras, Cabai Merah, Cabai rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam, Daging Sapi, Telur, Minyak Goreng, Gula Pasir

Grafik III.13. Bobot Inflasi 10 Komoditas Pangan Strategis Terhadap Inflasi IHK Pangan

Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya dilakukan *gap analysis* terhadap indikator keberhasilan empat strategi utama. *Gap analysis* dilakukan dengan cara menilai kondisi saat ini dengan target yang ingin dicapai dari setiap strategi utama. Berdasarkan hasil *gap analysis*, Peta jalan pengendalian inflasi 2019-2021 perlu difokuskan pada strategi utama Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi mengingat kondisi sampai dengan tahun 2017, target yang ingin dicapai belum terpenuhi. Sementara itu, strategi Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif juga tetap perlu dicermati di tengah beberapa indikator yang telah dicapai.

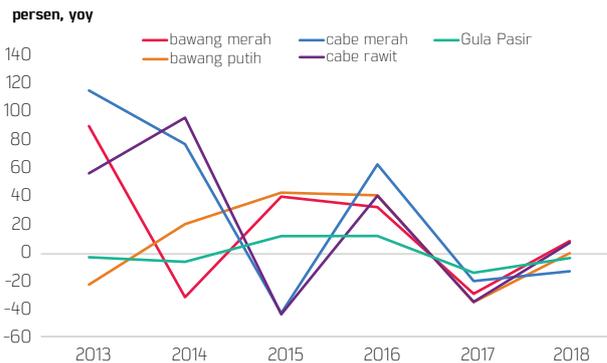
Strategi utama diimplementasikan melalui program strategis. Strategi utama Keterjangkauan Harga akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni Stabilisasi Harga dan Pengelolaan Permintaan. Strategi utama Ketersediaan Pasokan akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni Memperkuat produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor pangan serta Memperkuat Kelembagaan. Strategi utama Kelancaran Distribusi akan dilaksanakan melalui dua program strategis yakni Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah dan Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan. Strategi utama Komunikasi Efektif akan dilaksanakan melalui dua program strategis yakni Memperbaiki Kualitas Data dan Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah.



Gambar III.3. Strategi Utama 4K dan Indikator Keberhasilan

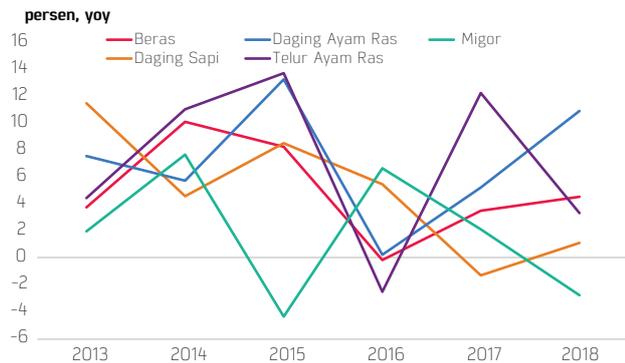
III. 2. 1. Gap Analysis Keterjangkauan Harga

Hasil *gap analysis* menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2016-2017) inflasi dan volatilitas inflasi sepuluh komoditas pangan strategis masih mengalami tren peningkatan kecuali daging sapi. Secara umum inflasi komoditas strategis tersebut masih diwarnai oleh pola siklikal tahunan. Volatilitas inflasi komoditas pangan strategis dalam dua tahun terakhir juga belum stabil. Namun demikian, inflasi pada 2018 lebih baik dibandingkan historis empat tahun terakhir kecuali komoditas beras, daging ayam, dan cabai rawit.



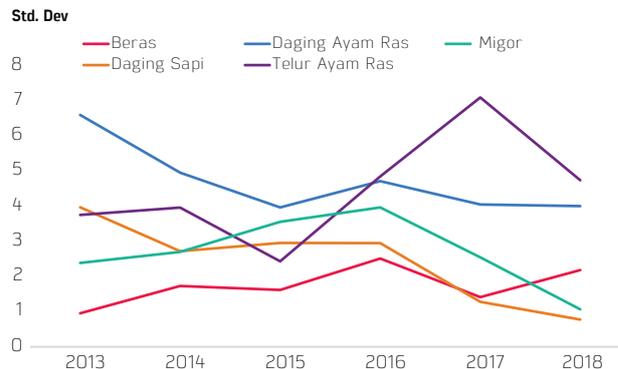
Grafik III.15. Inflasi Komoditas Pangan Strategis (2)

Sumber: BPS, diolah



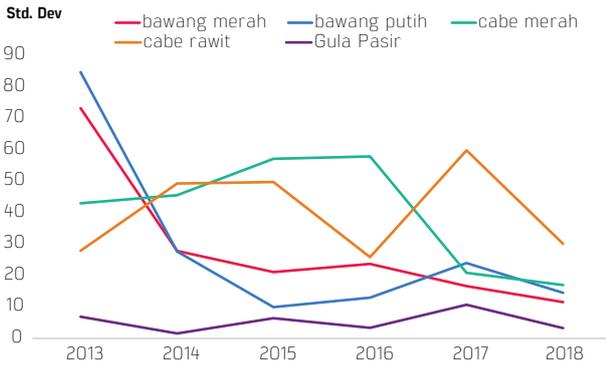
Grafik III.14. Inflasi Komoditas Pangan Strategis (1)

Sumber: BPS, diolah



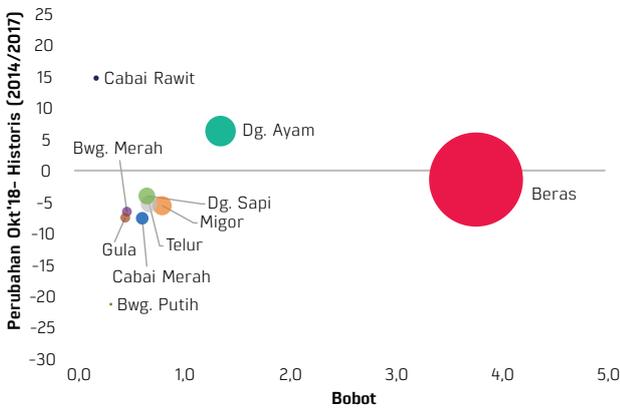
Grafik III.16. Volatilitas Inflasi Komoditas Pangan Strategis (1)

Sumber: BPS, diolah



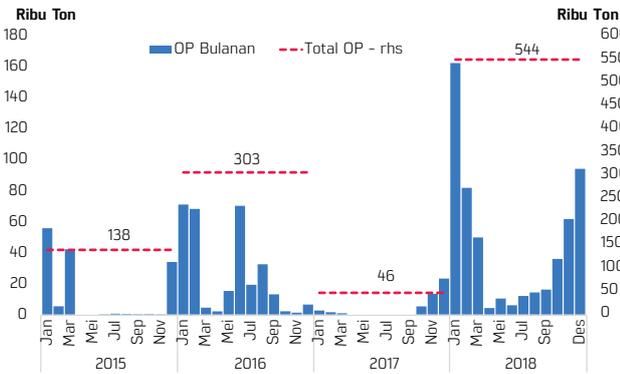
Grafik III.17. Volatilitas Inflasi Komoditas Pangan Strategis (2)

Sumber: BPS, diolah



Grafik III.18. Pangsa Komoditas Strategis dalam IHK dan Perkembangan 2018 Dibandingkan Historis

Sumber: BPS, diolah



Grafik III.19. Realisasi Operasi Pasar BULOG

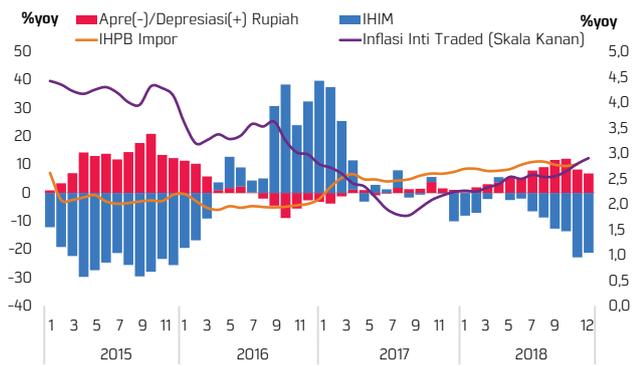
Sumber: Bulog, diolah

Inflasi dan volatilitas inflasi yang belum stabil antara lain dipengaruhi oleh terbatasnya instrumen stabilisasi harga milik Pemerintah.

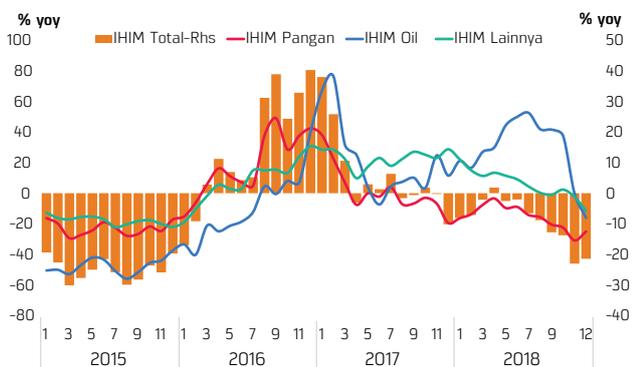
Untuk beras, inflasi dan volatilitas inflasi antara lain disebabkan oleh pelaksanaan Operasi Pasar (OP) yang masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan OP mencakup keterbatasan anggaran, sistem informasi yang belum terintegrasi dan outlet penyaluran yang terbatas. OP terutama dilaksanakan pada bulan Januari-Maret dan November-Desember ketika terjadi paceklik (masa tanam), HBKN atau gejolak harga karena gangguan pasokan lainnya seperti akhir tahun 2015 ketika tidak ada Raskin (digantikan dengan OP Khusus). Jumlah OP khususnya beras relatif minimal dengan terbatasnya anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yakni hanya sekitar 1% dari konsumsi beras. Selain itu dalam pelaksanaannya, penyaluran OP masih menghadapi permasalahan belum terintegrasinya sistem informasi aliran barang dan pasar serta terbatasnya outlet penyaluran OP. Sementara itu, untuk komoditas pangan strategis lainnya, Pemerintah belum memiliki cadangan pangan, sehingga OP yang dilakukan oleh Bulog masih terbatas. Selain beras, Bulog hanya melakukan OP terhadap daging sapi dan bawang merah dengan mekanisme pasar murah yang pendanaannya menggunakan anggaran komersial BULOG.

Sementara itu, tantangan pengendalian inflasi dari eksternal relatif terbatas pada dua tahun terakhir.

Terbatasnya dampak dari faktor eksternal bersumber dari penurunan harga komoditas global ditengah kenaikan tekanan nilai tukar Rupiah. Peningkatan inflasi terutama terlihat di tingkat pedagang besar, yang dicerminkan oleh kenaikan inflasi Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) impor. Sementara itu dampaknya terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif terbatas. Relatif rendahnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh (i) perkembangan harga komoditas global yang cenderung menurun, terutama untuk komoditas pangan serta besi baja; (ii) kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat; (iii) dan strategi pelaku usaha yang lebih cenderung merespons pelemahan nilai tukar dengan mengurangi margin usaha daripada menaikkan harga jual.

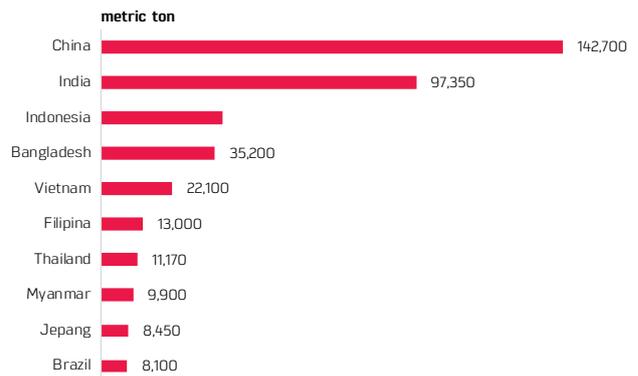


Grafik III.20. Inflasi Inti, Indeks Harga Komoditas Global, IHPB Impor dan Nilai Tukar Rupiah
 Sumber: Bloomberg, BPS, Bank Indonesia, diolah

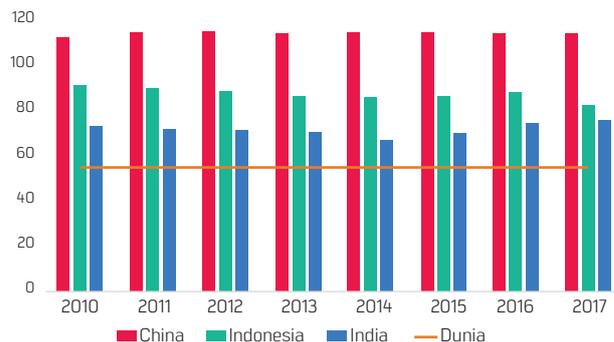


Grafik III.21. Indeks Harga Imported Inflation
 Sumber: Bloomberg, Bank Indonesia, diolah

Dari sisi konsumsi, tantangan pengendalian inflasi bersumber dari besarnya konsumsi pada komoditas pangan utama. Untuk komoditas beras, meski cenderung menurun namun Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras per kapita tertinggi di dunia. Dari sisi rumah tangga, pangsa pengeluaran konsumsi beras dibandingkan konsumsi jenis pangan lainnya (rata-rata per bulan) merupakan yang tertinggi yaitu 5,7% dari total pengeluaran.



Grafik III.22. Konsumsi Beras Beberapa Negara
 Sumber: BPS, USDA, Statista, diolah

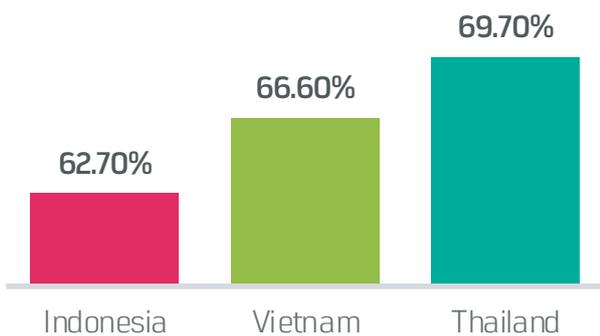


Grafik III.23. Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita (kg)
 Sumber: BPS, USDA, Statista, diolah

III. 2. 2. Gap Analysis Ketersediaan Pasokan

Hasil *gap analysis* menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan dari aspek produksi masih menghadapi tantangan dari *off farm*. Tantangan dari aspek produksi tercermin dari masih rendahnya rendemen beras Indonesia saat ini, yakni sebesar 62,7% lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Thailand yang masing-masing sebesar 66,6% dan 69,7%. Rendahnya tingkat rendeman atau produktivitas *off farm* pertanian Indonesia disebabkan beberapa faktor, yaitu (i) Komoditas padi: penanganan pasca produksi masih tradisional sehingga kualitas gabah yang dihasilkan rendah, baik diukur dengan menggunakan tingkat kehilangan (*loss*) maupun kualitas beras yang dihasilkan; (ii) Komoditas kelapa sawit: kurangnya perhatian dalam memilih kualitas benih, kondisi iklim, pola panen, dan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP)⁸.

⁸ Indonesia memiliki tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di tingkat perusahaan/petani. Pada mata rantai proses produksi tandan buah segar (mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan) mengacu pada manajemen perkebunan terbaik (*Good Agriculture Practices*) dan ISO. Pada proses produksi CPO di pabrik kelapa sawit (CPO mill) maupun industri hilir minyak sawit mengacu pada manajemen pabrik pengolahan terbaik (*Good Manufacturing Practices*) dan ISO. Sedangkan standar kualitas produk mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

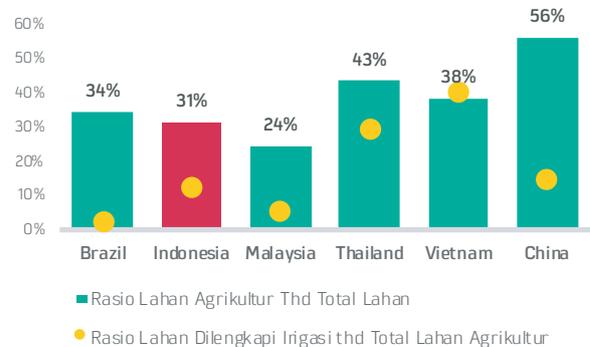


Grafik III.24. Indikator Produktivitas Beras Berbagai Negara (Tingkat Rendeman Beras)

Sumber: BPS, Perpadi, Lembaga Riset Perkebunan, diolah

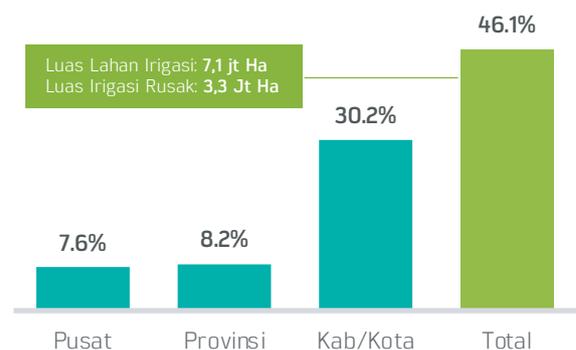
Ketersediaan pasokan dari aspek produksi juga masih menghadapi tantangan dari *on farm*. Dari sisi *on farm*, pemanfaatan lahan pertanian Indonesia belum didukung dengan akses dan kualitas infrastruktur pertanian yang memadai. Indonesia termasuk 20 negara dengan pemanfaatan lahan pertanian terbesar, dengan rasio pemanfaatan lahan bagi pertanian yang mencapai 30%. Namun, belum diimbangi dengan akses ketersediaan infrastruktur pertanian, bahkan dengan tingkat kualitas yang rendah. Mayoritas infrastruktur yang rusak berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dari sisi produktivitas, sejumlah aspek *on farm* maupun *off farm* berdampak terhadap tingkat produktivitas lahan pertanian. Kendala produktivitas dari sisi *off farm* antara lain

mencakup kualitas infrastruktur pendukung yang masih terbatas seperti infrastruktur pengairan, gudang, dan jalan produksi. Selain itu, akses terhadap aplikasi teknologi dan mekanisasi pertanian dirasakan masih minim sehingga usaha pertanian belum sepenuhnya dijalankan secara efisien.



Grafik III.25. Rasio Lahan dan Kelengkapan Irigasi – Perbandingan Beberapa Negara

Sumber: FAO, KemenPUPR, diolah



Grafik III.26. Status Kerusakan Infrastruktur Irigasi Berdasarkan Wewenang Pemerintah

Sumber: KemenPUPR, diolah

Pemerintah telah berupaya mempercepat peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan. Proyek infrastruktur ketahanan pangan pemerintah sampai dengan akhir 2017 menunjukkan pencapaian yang positif, meski terdapat sejumlah tantangan yang mengakibatkan realisasi dibawah target tahunan, terutama terkait pembebasan lahan. Pada 2018, agenda pembangunan infrastruktur ketahanan pangan masih berlanjut dengan target yang cukup tinggi.

	Bendungan	Embung	Jaringan Irigasi Baru	Rehab Jaringan Irigasi
Target 2015 - 2019	65 49 baru, 16 Lanjutan	1.893	1 Jt Ha	3 Jt Ha
Realisasi s.d 2017	36 27 Baru, 9 Selesai	846	639,9 Jt Ha	1,1 Jt Ha

Grafik III.27. Perkembangan Infrastruktur Ketahanan Pangan - 2017

Sumber: KemenPUPR, Kementan, diolah



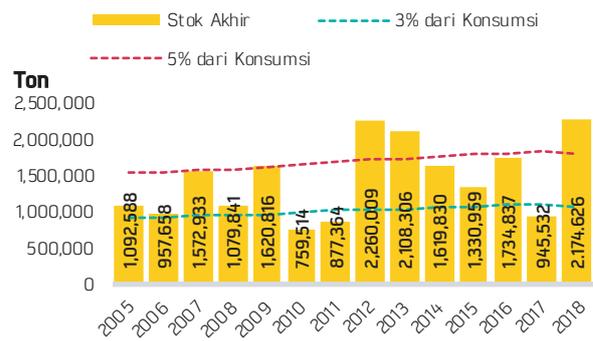
*11 baru, a.l: Mbay, Manikin, Bagong, Randugunting, Sadawarna, Rukoh, Bolango Hulu, Tamblang, Pelosika, Riam Kiwa, dan Baliem

36 on-going, a.l: Ciawi, Tapin Sei Gong, Karian, Bintang Bano

Grafik III.28. Fokus Infrastruktur Ketahanan Pangan 2018

Sumber: KemenPUPR, Kementan, diolah

Hasil *gap analysis* terhadap ketersediaan pasokan juga menunjukkan bahwa cadangan pangan pemerintah masih terbatas. Jumlah stok beras di Bulog selama ini sesuai dengan kriteria FAO namun stok tersebut juga mencakup alokasi untuk Rastra. Berdasarkan kriteria FAO, cadangan pangan ideal adalah 3%-5% dari kebutuhan konsumsi nasional. Dengan jumlah konsumsi nasional 2017 sebesar 30 juta ton, maka cadangan pangan ideal Indonesia sebesar 900 ribu ton - 1,5 juta ton. Angka tersebut sejalan dengan asesmen Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yaitu antara 1,85 juta - 2 juta ton. Sejak dibentuk tahun 2005, CBP yang dimiliki Pemerintah paling tinggi sebesar 514 ribu ton. Namun karena pengelolaannya menyatu dalam stok Bulog yang didalamnya termasuk beras Rastra, maka stok keseluruhan di Bulog relatif sesuai dengan kriteria FAO. Di tahun 2018, CBP dianggarkan sejumlah Rp2,5 triliun, tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi saat ini, stok beras BULOG terhadap konsumsi di Indonesia masih ideal sesuai dengan kriteria FAO meski lebih kecil dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.



Grafik III.29. Stok Akhir Beras BULOG

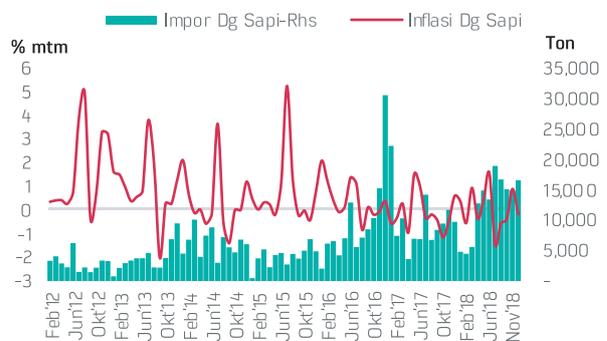
Sumber: Bulog, diolah

Stok terhadap Total Konsumsi	
Indonesia (BULOG)	5% - 7%
Malaysia (Bernas)	10%
Filipina (NFA)	14% - 40%
Vietnam (NRD)	4%
Thailand (PWO)	120% - 130%

Tabel III.1. Perbandingan Rasio Stok Beras Terhadap Total Konsumsi

Sumber: Bulog, Bernas, NFA, NRD, PWO, diolah

Hasil *gap analysis* terhadap ketersediaan pasokan juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan impor untuk mendukung kecukupan pasokan masih dapat ditingkatkan. Untuk komoditas beras, kekurangan pasokan pada akhir tahun 2014 dan 2017 baru diikuti oleh pembukaan keran impor setelah beberapa waktu sehingga sempat terjadi lonjakan harga untuk beberapa bulan. Untuk komoditas daging sapi, perencanaan impor sudah lebih baik seiring dengan karakteristik neraca pangan daging sapi yang masih defisit.



Grafik III.30. Impor Daging Sapi

Sumber: Cognos, Bank Indonesia, diolah

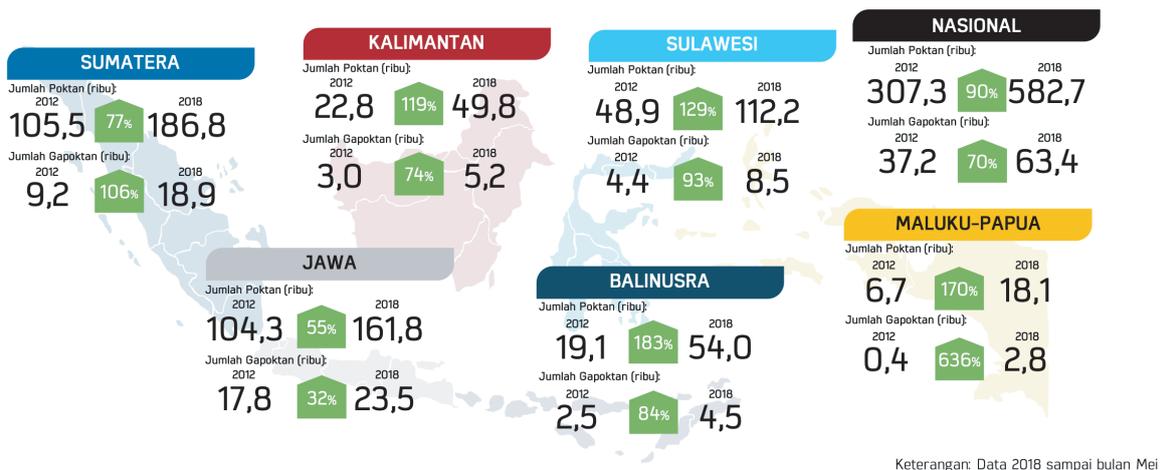
Upaya peningkatan produksi tidak terlepas dari upaya penguatan kelembagaan petani. Keberadaan kelembagaan petani, sebagai salah satu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar perlu terus didorong. Permasalahan mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah lemahnya posisi tawar petani dalam negosiasi hasil produksinya. Peningkatan produktivitas pertanian tidak menjadi jaminan bagi peningkatan keuntungan bagi petani. Lemahnya posisi tawar petani pada umumnya disebabkan oleh kurangnya akses pasar, informasi mengenai harga pasar, serta permodalan yang kurang memadai. Petani dihadapkan pada kegagalan pasar yang mengakibatkan tingginya biaya

transaksi, baik untuk pendanaan maupun akses ke pasar, serta skala ekonomi yang rendah. Pembentukan lembaga petani, terutama yang berbadan hukum dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Hingga 2018 Pemerintah telah mendorong berkembangnya jumlah kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan). Jumlah kelembagaan petani dalam tahapan fase terkecil yaitu kelompok tani/gabungan kelompok tani menunjukkan peningkatan. Bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan cukup signifikan dari 307,3 ribu poktan dan 37,2 ribu gapoktan (2012).



Gambar III.4. Fungsi dan Bentuk Lembaga Petani

Sumber: Kementan, diolah



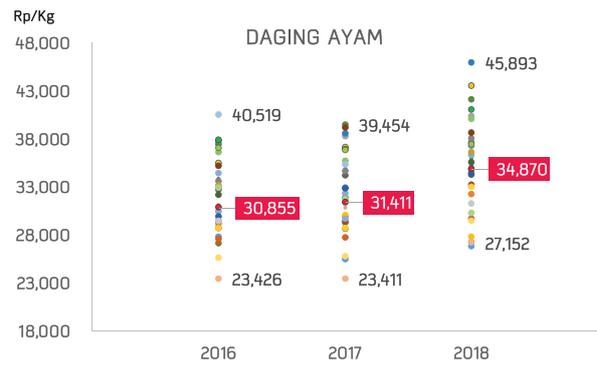
Gambar III.5. Jumlah Poktan dan Gapoktan Indonesia 2012-2018

Sumber: Kementan, diolah

III. 2. 3 Gap Analysis Kelancaran Distribusi

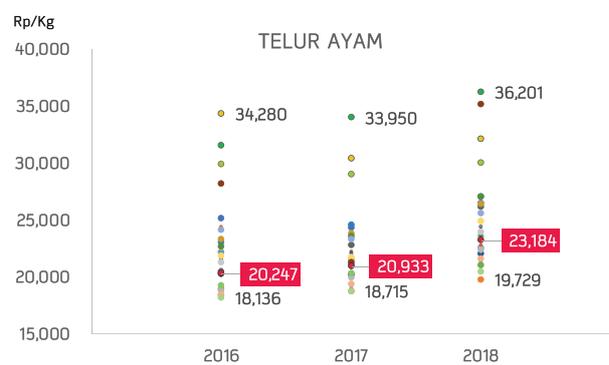
Hasil *gap analysis* menunjukkan bahwa disparitas harga antara provinsi dengan nasional saat ini belum menunjukkan perbaikan. Dari sepuluh komoditas yang diamati, hanya empat komoditas yang mengalami penurunan disparitas harga pada 2016 – 2018 yaitu beras, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Sementara komoditas lainnya mengalami kenaikan (daging ayam dan telur ayam) atau belum mengalami perbaikan yaitu daging sapi, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir. Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat daerah-daerah yang merupakan sentra produksi (daerah surplus) dan daerah-daerah yang merupakan net konsumen (daerah defisit), maka diperlukan proses distribusi untuk memenuhi keseimbangan permintaan dan penawaran akan komoditas tertentu. Dalam proses distribusi, hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya biaya distribusi yang menyebabkan harga komoditas pangan di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Untuk komoditas beras, jalur distribusi komoditas beras yang cukup kompleks juga menyisakan beberapa tantangan. Studi Ridhwan dkk (2012) menunjukkan bahwa perdagangan beras domestik terpusat di Jawa yang merupakan sentra produsen utama sekaligus juga berperan sebagai hub atau jalur distribusi utama. Sebagai akibatnya, daerah defisit beras yang terletak cukup jauh (*remote*) dari sentra produksi dan memiliki hambatan distribusi (seperti keterbatasan infrastruktur) berpotensi memiliki harga beras yang lebih tinggi. Untuk komoditas *perishable* (bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit) dampak gangguan distribusi terhadap lonjakan harga lebih signifikan⁹. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik cabai merah yang *perishable*, sehingga gangguan distribusi yang menyebabkan waktu tempuh untuk pengiriman lebih lama akan berdampak pada penurunan pasokan yang pada akhirnya memicu kenaikan harga komoditas *perishable* tersebut. Berdasarkan penelitian yang sama, terindikasi bahwa semakin jauh jarak suatu daerah dengan sentra ekonomi, maka biaya transportasi akan semakin tinggi dan variabilitas antar daerah harga komoditas tersebut semakin besar. Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, tingginya disparitas harga antar daerah lebih didorong oleh panjangnya rantai distribusi kedua komoditas tersebut.

9 Ridhwan, dkk "Kajian Komoditas Pangan Strategis: Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan" Working paper Bank Indonesia 2012



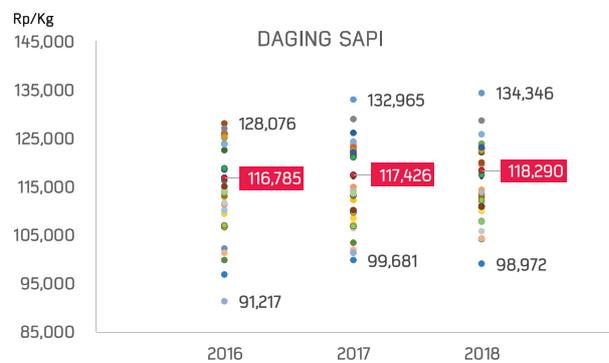
Grafik III.31. Perbandingan Harga Komoditas Daging Ayam Ras di Daerah dan Nasional

Sumber: PIHPS, diolah



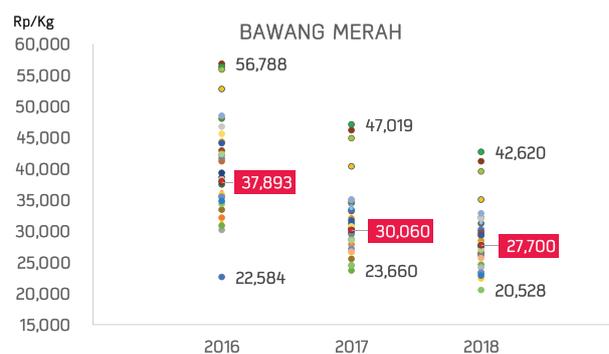
Grafik III.32. Perbandingan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Daerah dan Nasional

Sumber: PIHPS, diolah



Grafik III.33. Perbandingan Harga Komoditas Daging Sapi di Daerah dan Nasional

Sumber: PIHPS, diolah



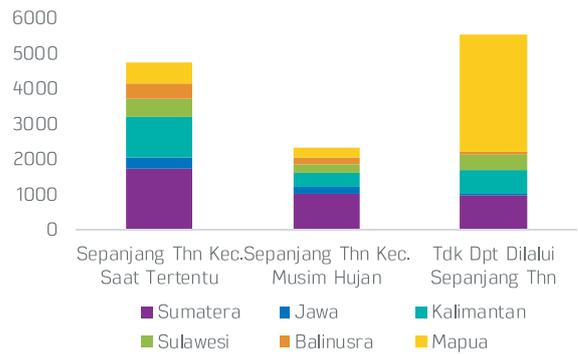
Grafik III.34. Perbandingan Harga Komoditas Bawang Merah di Daerah dan Nasional

Sumber: PIHPS, diolah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah besarnya biaya logistik yang mencapai 24% dari PDB (2016), lebih tinggi dibandingkan negara lain yang hanya sebesar 15%. Tingginya biaya distribusi ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian harga di Indonesia. Secara umum permasalahan distribusi pada komoditas pangan strategis dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, permasalahan distribusi antar waktu karena komoditas pangan yang pada umumnya bersifat musiman (seasonal). Kedua, selain distribusi antar waktu, kendala lainnya adalah distribusi antar daerah. Biaya distribusi untuk menjangkau daerah konsumen (daerah yang mengalami defisit) menyebabkan harga pangan menjadi lebih tinggi dibanding daerah produsen. Bahkan, level harga bisa melonjak tinggi dan cenderung berfluktuasi jika selama proses distribusi juga mengalami berbagai gangguan. Permasalahan distribusi antar daerah tersebut biasanya dikarenakan kurangnya dukungan sarana infrastruktur termasuk transportasi sebagai sarana untuk memobilisasi barang sehingga barang dapat dijangkau dengan tepat waktu dan tepat tempat.

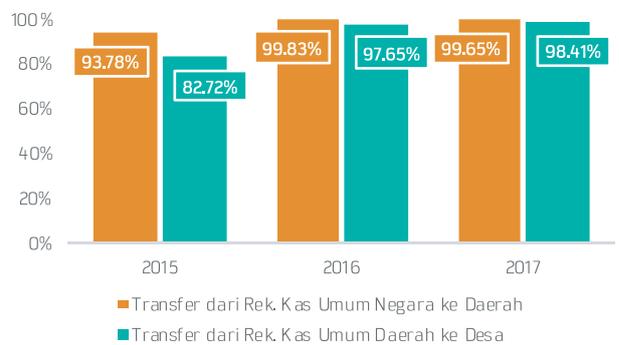
Infrastruktur konektivitas yang ada saat ini di daerah masih terbatas, termasuk di wilayah pedesaan. Terdapat ketimpangan kualitas konektivitas antar daerah, terutama Jawa dan luar Jawa, sehingga mempengaruhi *logistic competence*¹⁰ dan *logistic efficiency*. Bahkan, tingkat konektivitas pedesaan yang merupakan sentra produksi pertanian di sejumlah wilayah, masih belum terjamin sepanjang tahun. Untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas di seluruh daerah, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk akselerasi perbaikan infrastruktur pertanian & konektivitas. Realisasi penyaluran dana desa telah menunjukkan perbaikan. Namun, perlu *refocusing* pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Hingga 2018, upaya perbaikan koneksi di pusat ekonomi (Kabupaten/Kota) menunjukkan pencapaian yang positif, namun koneksi yang lebih merata perlu terus diakselerasi. Perbaikan kualitas komunikasi/informasi telah dilakukan di sebagian besar Kabupaten/Kota, namun perbaikan koneksi di wilayah terluar masih memerlukan upaya yang lebih luas. Implementasi Palapa Ring untuk wilayah tengah dan timur Indonesia perlu diakselerasi.

¹⁰ The competence and quality of logistics services (including transport operators and customs brokers) - World Bank. Ranking Logistic competence Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) yang diterbitkan oleh World Bank telah meningkat dari 55 pada 2016 menjadi 44 pada 2018.



Grafik III.35. Jumlah Desa Yang Tidak Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun

Sumber: BPS, diolah



Grafik III.36. Realisasi Penyaluran Dana Desa

Sumber: Kemen. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Gambar III.6. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (2017)

Sumber: Kemen. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

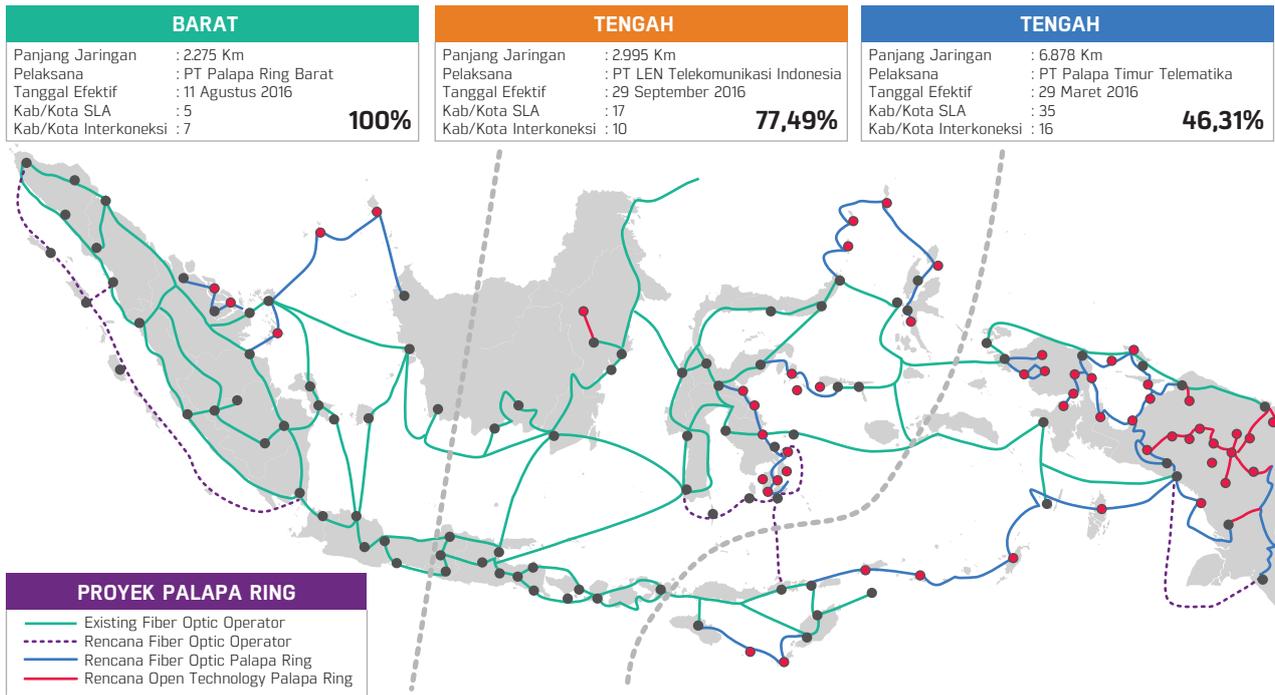
	2016	2017
Jumlah IKK* Terkoneksi Serat Optik	424	444
Jumlah IKK Terkoneksi 4G	58	331
% Desa 3T Memiliki Akses Komunikasi (Pembangunan BTS)*	1.9% 106 Desa	7.11% 393 Desa

IKK: Ibukota kabupaten/kota
3T: Terluar, Terdepan, Tertinggal

*Jumlah IKK 514 Kabupaten/Kota Jumlah desa 3T 5.520 Desa

Gambar III.7. Peningkatan Kualitas Koneksi Komunikasi

Sumber: Kemenkominfo, diolah



Gambar III.8. Implementasi Palapa Ring (Per w2 Mei 2018)

Sumber: Kemenkominfo

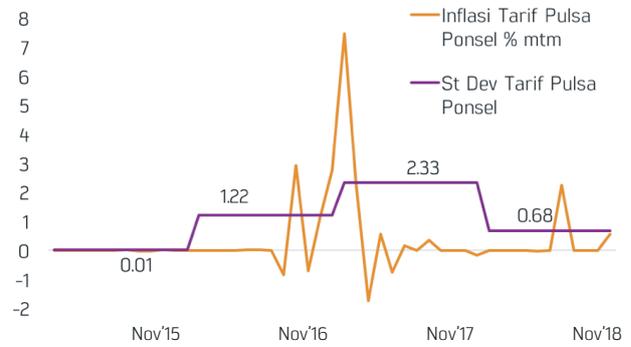
III. 2. 4 Gap Analysis Komunikasi Efektif

Hasil *gap analysis* menunjukkan bahwa untuk aspek ini, kualitas statistik dan kinerja TPID masih perlu ditingkatkan sementara ekspektasi inflasi telah terjangkau dalam rentang sasaran inflasi. Data dari PIHPS menunjukkan bahwa dari sepuluh komoditas yang diamati, harga tiga komoditas masih memiliki korelasi di bawah 80% dengan data BPS, yakni gula pasir, minyak goreng dan daging sapi. Selain itu, statistik inflasi beberapa komoditas dalam keranjang IHK juga memerlukan penyempurnaan, seperti beras. Untuk kinerja TPID, kualitas kinerja TPID masih dapat ditingkatkan. Sementara itu, ekspektasi inflasi telah terjangkau pada sasaran inflasi baik ekspektasi inflasi untuk satu tahun kedepan maupun dua tahun kedepan. Hal tersebut dicapai melalui peningkatan kredibilitas kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan Pemerintah lainnya serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Upaya peningkatan produksi juga perlu didukung oleh penyediaan data pertanian yang lebih akurat. Upaya perbaikan data antara lain mencakup verifikasi lahan sawah. Berdasarkan hasil verifikasi sementara Badan Geospasial Nasional, terdapat selisih yang cukup besar dari data yang dipublikasikan oleh BPN/ATR (2013). Akurasi dan sinkronisasi data pertanian antar Kementerian dan Lembaga juga diperlukan untuk mendukung penetapan strategi kebijakan pertanian nasional.

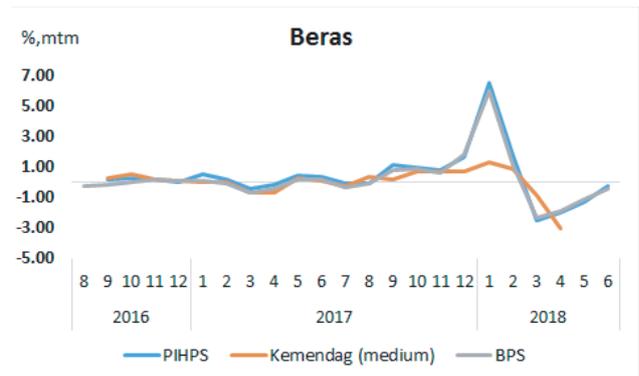
Terkait dengan upaya peningkatan kualitas data inflasi, HLM TPIP pada Januari 2018 telah menyepakati upaya penguatan kualitas statistik inflasi dengan berkoordinasi dengan BPS. Kesepakatan tersebut juga merupakan tindak lanjut program kerja TPIP tahun 2017. Upaya perbaikan statistik dilakukan terhadap tiga komoditas, yakni harga beras, tarif pulsa ponsel dan tarif angkutan udara. BPS membutuhkan

data sekunder yang diperoleh dari Kementerian terkait (Kemenkominfo, Kemenhub dan Kemendag). Harmonisasi data mencakup antara lain jenis dan kualitas data komoditas, serta lokasi dan waktu pencacahan.



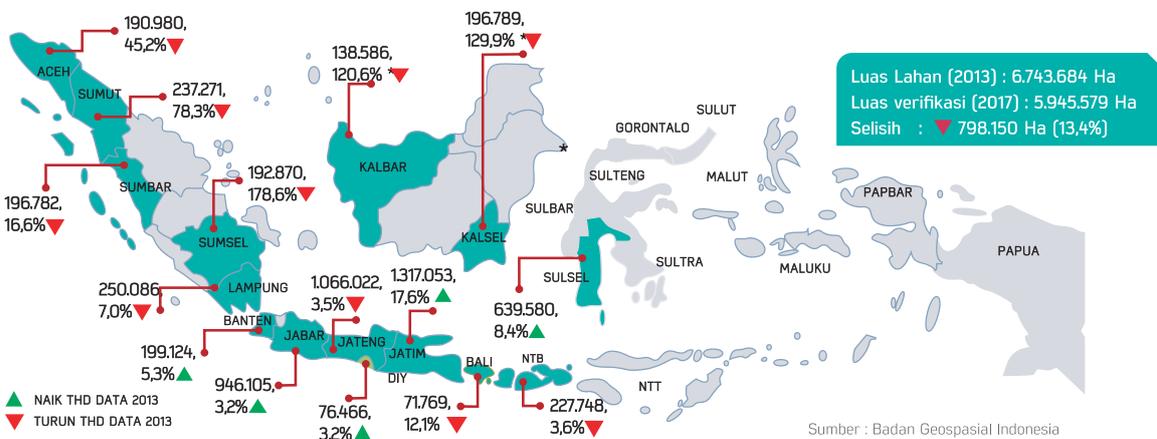
Grafik III.37. Inflasi Tarif Pulsa Ponsel

Sumber: BPS, diolah



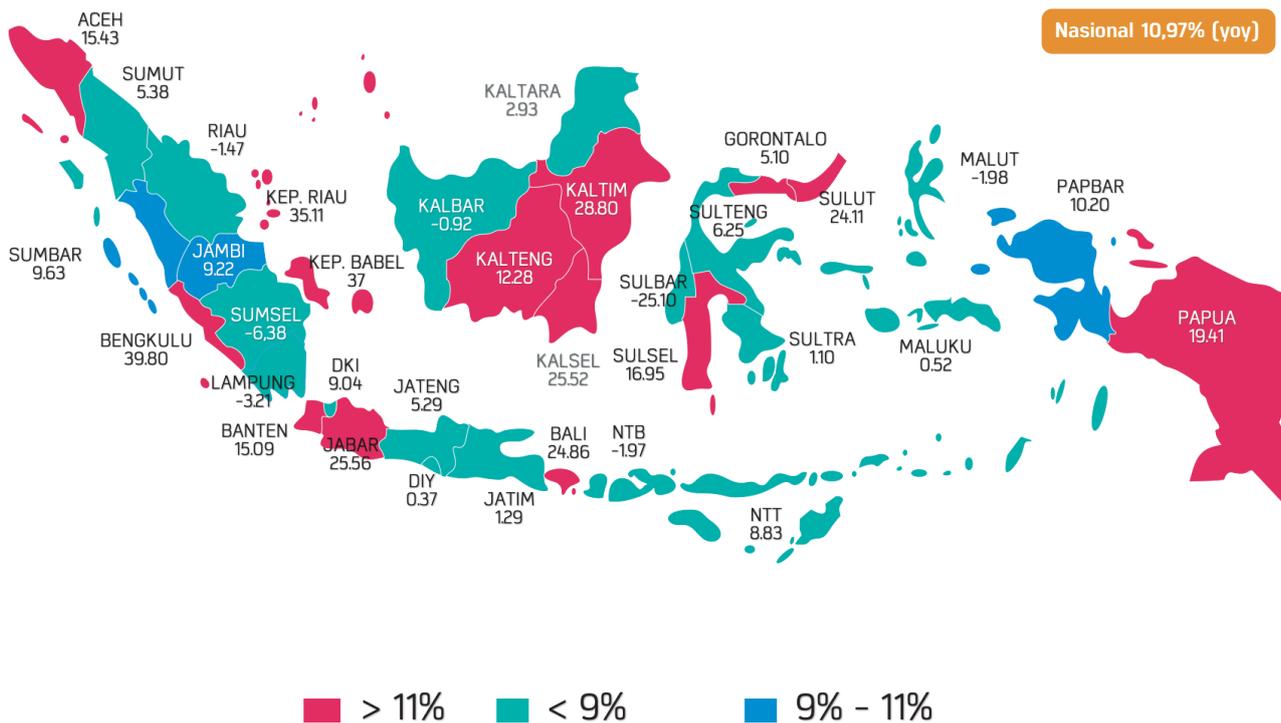
Grafik III.38. Inflasi Beras

Sumber: PIHPS, Kemendag, BPS



Gambar III.9. Hasil Verifikasi Lahan Baku Sawah 2017 (Ha)

Sumber: Badan Geospasial Indonesia



Gambar III.10. Inflasi Angkutan Udara 2015-2017 (yoy)

Sumber: BPS, diolah

Terkait dengan upaya penguatan koordinasi pusat dan daerah, diperlukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan *Administered Prices* dan *Volatile Food*. Koordinasi tersebut diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi. Hal tersebut dikarenakan secara historis kebijakan *administered prices* maupun gangguan pada kelompok *volatile food* seringkali menjadi pendorong terlampainya sasaran inflasi. Realisasi inflasi yang melampaui sasaran inflasi pada 2005, 2008, 2013 dan 2014 disebabkan oleh *shock* kebijakan pemerintah terkait harga energi, Sementara itu, *shock* inflasi *volatile food* menjadi penyebab sasaran inflasi tahun 2009, 2010 dan 2011 terlampaui.

Terkait dengan kinerja TPID, upaya peningkatan kinerja antara lain dilakukan melalui peningkatan partisipasi dalam penilaian TPID dalam Rakornas Pengendalian Inflasi.

Untuk mendorong partisipasi aktif TPID di setiap daerah serta memberikan apresiasi atas kerja TPID, Presiden memberikan penghargaan kepada TPID terbaik setiap tahun. Proses penilaian dan penetapan pemenang penghargaan dilakukan tim penilai yang terdiri atas anggota Pokja Daerah TPIP dan beberapa pakar dari kalangan akademisi yang mengamati aktivitas TPID di daerah. Namun demikian, hingga 2018 tingkat partisipasi dalam TPID award yang diselenggarakan setiap tahun masih

relatif rendah. Tingkat partisipasi wilayah Jawa-Bali dalam menyampaikan laporan TPID paling tinggi (61,1%) sedangkan paling rendah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (26,43%). Begitu pula dengan penyampaian dokumen¹¹ inovasi program unggulan/OPS¹². Dari 81 kabupaten/kota IHK, sebanyak 26 daerah atau 32,1% tidak menyampaikan laporan baik dokumen atau OPS dengan urutan wilayah tertinggi yaitu Jawa Bali (9,9%), Nusa Mapua (8,6%), Sulawesi (7,4%), dan Sumatera (6,2%). Meski demikian, dibandingkan 2016, terdapat peningkatan partisipasi sebesar 42,33% (untuk dokumen penilaian) dan 36,1% (untuk dokumen OPS).

¹¹ Dokumen merupakan laporan terkait komponen koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas.

¹² OPS merupakan laporan terkait komponen inovasi program unggulan

III. 3. Program Strategis

Implementasi program-program yang tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019 – 2021 dilaksanakan secara bertahap. Masing-masing strategi utama 4K akan dilaksanakan melalui dua program strategis yang memiliki beberapa sub program yang merupakan penjabaran detail kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

III. 3. 1. Keterjangkauan Harga

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni Stabilisasi Harga dan Pengelolaan Permintaan. Upaya menjaga stabilitas harga dilakukan baik pada tingkat produsen maupun konsumen. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain menetapkan kebijakan harga pangan dan menggunakan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP). Selain itu, upaya menjaga stabilitas harga juga perlu didukung oleh upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna menjaga stabilitas harga barang-barang yang berasal dari impor. Upaya mengelola sisi permintaan dilaksanakan melalui kebijakan moneter agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Selain itu, pengelolaan permintaan juga dilakukan dengan kebijakan diversifikasi pangan.

III. 3. 1. 1. Stabilisasi Harga

- 1. Meningkatkan keselarasan dan keterpaduan program pengendalian inflasi nasional.** Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional. Peraturan tersebut merupakan turunan dari PP 17/2017 mengenai Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Kepres 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Adapun ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: (i) penyusunan perencanaan pengendalian inflasi yang mencakup penyusunan rencana strategi pengendalian inflasi 4K; (ii) tata cara pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi; (iii) dukungan sistem informasi perencanaan serta pemantauan dan evaluasi dalam pengendalian inflasi; serta (iv) tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana Sinkronisasi Perencanaan Pengendalian Inflasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Permen tersebut ditargetkan selesai pada 2018-2019.
- 2. Optimalisasi Operasi Pasar (OP) dan Pasar Murah**

(PM). Optimalisasi OP dan PM dilakukan untuk sepuluh komoditas bahan pangan strategis dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah. Upaya ini antara lain dilakukan melalui **Reformulasi Operasi Pasar** menjadi **KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga)**. Kegiatan KPSH sementara diutamakan untuk komoditas beras yang dilaksanakan apabila terjadi Gejolak Harga Beras di tingkat konsumen mencapai 2% atau lebih. Apabila *threshold* ini terjadi, maka Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, melakukan tindakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras yang penyalurannya dapat melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan di tingkat eceran. Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perum BULOG untuk melakukan stabilisasi harga beras menggunakan CBP dengan berdasar pada hasil evaluasi harga rata-rata Beras secara nasional yang menunjukkan terjadinya Gejolak Harga Beras dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, pelaksanaan stabilisasi harga beras juga dapat dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, BULOG Pusat akan menyampaikan rencana KPSH kepada BULOG Divre/Subdivre/Kansilog dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Pemerintah Daerah dan Satgas Pangan. Pelaksanaan KPSH dilaksanakan oleh distributor besar dan/atau mitra, Rumah Pangan Kita (RPK)/pedagang pengecer dan Satgas BULOG. Beras yang digunakan dalam KPSH adalah jenis medium dengan harga penjualan setinggi-tingginya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing wilayah. Pelaksanaan KPSH nantinya diharapkan dapat: i) termonitor dengan mudah melalui sistem *bulir.id*; ii) terdistribusi dengan baik ke daerah yang terdampak kenaikan harga beras; dan iii) tepat sasaran. Kegiatan tersebut ditargetkan selesai secara bertahap dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018-2019, optimalisasi PM dan KPSH dilakukan untuk komoditas beras, daging sapi dan bawang merah terlebih dahulu. Selanjutnya, pada tahun 2019-2021 dilakukan untuk komoditas lainnya dengan Kementerian Perdagangan dan BULOG sebagai penanggung jawabnya.

- 3. Menjaga volatilitas nilai tukar.** Nilai tukar yang terkendali dengan volatilitas yang rendah merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi khususnya di sisi eksternal. Upaya tersebut dilakukan Bank Indonesia melalui a) **Kebijakan Stabilisasi** yang mencakup kebijakan suku bunga (BI7DRR); *double intervention* di pasar valas dan SBN untuk menjaga nilai tukar di level fundamentalnya; kebijakan

Giro Wajib Minimum (GWM) *averaging* untuk menjaga ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan dan meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas perbankan; b) **Akselerasi Pendalaman Pasar Keuangan** melalui penyediaan *swap valas* yang lebih efisien dan mendorong penggunaan instrumen *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) untuk mendukung bekerjanya mekanisme pasar dalam penentuan nilai tukar Rupiah dan memperluas instrumen lindung nilai (*hedging*); serta menerbitkan aturan baru transaksi derivatif suku bunga Rupiah, yaitu *Interest Rate Swap* (IRS) dan *Overnight Index Swap* (OIS); dan c) **Penguatan Cadangan Devisa dan kerja sama keuangan internasional** berupa pengelolaan kecukupan cadangan devisa dan penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JKI) melalui kerja sama *swap* bilateral dengan bank sentral lain dan multilateral.

III. 3. 1. 2. Mengelola Permintaan

- Menjaga keseimbangan internal perekonomian.** Bank Indonesia akan terus menempuh kebijakan yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan moneter (BI7DRR dan GWM), makroprudensial (antara lain *Loan to Value* ratio/LTV, Rasio Intermediasi Makroprudensial/RIM, Penyangga Likuiditas Makroprudensial/LPM) serta sistem pembayaran (antara lain melalui *Real-Time Gross Settlement* /RTGS, Sistem Kliring Nasional/SKNBI, Gerbang Pembayaran Nasional/GPN, elektronikasi pembayaran nontunai). Untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia serta memperluas alternatif pembiayaan ekonomi dilakukan pendalaman pasar keuangan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah, OJK dan sejumlah lembaga keuangan. Di samping itu, dalam mengelola permintaan diperlukan juga dukungan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa subsidi, bantuan sosial (Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Pangan Nontunai/BPNT), dan kebijakan perlindungan sosial lainnya. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
- Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan.** Kegiatan tersebut dapat disinergikan dengan program Desa, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah. Kegiatan ini dilatarbelakangi karena selama ini pola konsumsi

masyarakat Indonesia masih didominasi oleh bahan makanan tertentu seperti beras dan cabai segar yang juga memiliki bobot relatif besar pada keranjang IHK¹³. Program Pemerintah untuk diversifikasi konsumsi pangan tersebut antara lain dengan memperkenalkan pola konsumsi pangan sehat yakni program Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

III. 3. 2. Ketersediaan Pasokan

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta Kebijakan Impor/Ekspor dan Memperkuat Kelembagaan. Upaya menjaga ketersediaan pasokan perlu dilakukan baik melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan cadangan pangan Pemerintah maupun fleksibilitas kebijakan impor untuk memenuhi kekurangan dari produksi dalam negeri. Selain itu, untuk meningkatkan pasokan, kelembagaan petani juga perlu diperkuat sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

III. 3. 2. 1. Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor pangan

- Peningkatan Produksi.** Langkah operasional peningkatan produksi bahan pangan utama padi, jagung, kedelai¹⁴, terbagi dua yaitu peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas. **Pertama**, upaya peningkatan luas tanam antara lain melalui pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru, optimasi lahan, penambahan lahan kering, peningkatan indeks pertanaman (IP)¹⁵, pemanfaatan lahan terlantar, dan penerapan pola tumpangsari. **Kedua**, upaya peningkatan produktivitas ditempuh antara lain melalui:
 - Optimalisasi kebijakan pemberian bantuan sarana produksi baik berupa benih, pupuk¹⁶, maupun alat mesin pertanian (alsintan). Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi benih dan pupuk, dilakukan dengan prinsip 6 tepat (yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam alokasi dan distribusi benih dan pupuk sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan benih penjenis

¹³ Bobot beras September 2018 adalah sebesar 3,78%, cabai merah sebesar 0,52% dan cabai rawit sebesar 0,16%.

¹⁴ Merujuk kepada arahan kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015 – 2019 mengenai Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula (renstra kementan 2015 – 2019)

¹⁵ Indeks pertanaman (IP) menunjukkan kekerapan pertanaman pada sebidang lahan. Secara harfiah dapat diartikan IP ini menunjukkan berapa kali seorang petani menanam padi dalam setahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pertanaman (IP) adalah irigasi, hama benih dan teknologi.

¹⁶ Saat ini jumlah petani penerima subsidi pupuk adalah sejumlah 8,8 juta petani dari sektor tanaman pangan, hortikultura, kebun rakyat, peternakan, dan perikanan budidaya.

(*breeder seed*) dan benih dasar (*foundation seed*) dan mengendalikan penyediaan benih pokok (*stock seed*) dan benih sebar (*extention seed*) yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Adapun penyediaan pupuk an-organik sebagian besar dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyediaan pupuk organik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat. Ke depan, optimalisasi kebijakan pemberian pupuk subsidi difokuskan kepada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien melalui penyempurnaan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK petani dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani. Optimalisasi bantuan alat dan mesin pertanian juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) oleh Pemerintah daerah.

- b. Perbaiki sistem budidaya tanaman pangan. Cuaca yang tidak menentu sering mengakibatkan petani sulit memperkirakan waktu untuk mengolah lahan dan memanen. Petani dan petugas lapangan perlu memiliki kemampuan dalam melakukan prakiraan iklim serta merencanakan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui dengan membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
- c. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat produksi pangan domestik, Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan infrastruktur irigasi. Sesuai kewenangannya, pembiayaan melalui Kementerian PUPR dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana irigasi primer dan sekunder, sedangkan di Kementerian Pertanian dilakukan perbaikan dan

Permasalahan utama pemberian subsidi adalah adanya potensi terjadinya penyimpangan karena penerima subsidi belum sepenuhnya sesuai target, dan potensi terjadi kesalahan karena database penerima subsidi yang belum terintegrasi.

pembangunan irigasi di tingkat usahatani (tersier). Untuk tahun 2019, KemenPUPR menargetkan pembangunan daerah irigasi baru sebesar 142.100 Ha dan melakukan rehabilitasi terhadap 681.500 Ha daerah irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi direncanakan akan difokuskan pada 15 provinsi produsen padi nasional, daerah irigasi yang memperoleh suplesi waduk, daerah proyeksi lumbung pangan nasional/ lokal, serta daerah di lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional¹⁷.

- d. Peningkatan investasi untuk ternak sapi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong peningkatan investasi bidang peternakan sapi dan industri olahan dalam negeri, guna pemerataan ekonomi dan pencapaian swasembada pangan. Berdasarkan data BKPM, investasi di sub sektor peternakan, terutama untuk peternakan sapi selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Nilai investasi PMDN untuk peternakan sapi meningkat dari Rp. 360,6 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp. 842,9 miliar pada 2017. Begitupula nilai investasi PMA meningkat dari USD11,3 juta dolar pada tahun 2013 menjadi USD159,7 juta dolar pada tahun 2017. Sementara itu, proyek investasi di bidang peternakan sapi juga meningkat yakni dari 15 proyek pada tahun 2015 menjadi 53 proyek pada tahun 2017. Ke depan, usaha untuk terus mendorong investasi di sektor peternakan dapat dilakukan antara lain dengan pengurangan pajak. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) bagi usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- e. Mempercepat pemanfaatan PMN BULOG untuk infrastruktur pasca panen. Dalam rangka pengelolaan pangan nasional dan kegiatan pokok sebagaimana

¹⁷ Ditetapkan berdasarkan Kepmentan No.830/2016.

No	Uraian	Unit	Lokasi
1	Modern Rice Milling Plant (MRMP)	7	Jember, Sumbawa, Bojonegoro, Grobogan, Lampung, Timur, Garut, Soppeng
2	Rice to Rice Processing Plant (RTR)	14	Bandar Lampung, Subang, Sidrap, Klaten, Pare-Pare, Bima, Pekalongan, Sidoarjo, Lombok Timur, Cirebon, Jombang, Lamongan, Pinrang, Purworejo
3	Pusat pengeringan dan penyimpanan jagung (Corn Dryer and Silo (CDC))	5	Gorontalo, Grobogan, Tuban, Wonogiri, Dompu
4	Gudang Kedele	3	Sidoarjo, Banyumas, Grobogan
5	Gudang Komoditas Pangan	22	Nias Barat, Bengkalis, B. Lampung (2), Sidoarjo (2), Tarakan, Berau, Katingan, Konawe Utara, Wajo, Bulukumba (2), Bantaeng, Luwuk, Luwuk Banggai, Gorontalo, Kep. Talaud, Halmahera Barat, Kep. Sula, Manokwari Selatan dan Nabire

Tabel III.2. Rincian Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen BULOG

Sumber: Bulog

amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Tahun 2016 sebesar Rp 2 Triliun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penambahan Penanaman Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum BULOG dalam rangka pembangunan sarana produksi dan tempat penyimpanan, guna meningkatkan kemampuan pengelolaan gabah/beras, jagung dan kedelai.

- f. Percepatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pembebasan lahan oleh Pemerintah daerah. Pemerintah telah menambah alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 menjadi Rp 826,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,3 persen dari alokasi pada APBN 2018. Hingga Oktober 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp44,43 triliun atau 74,05 persen dari pagunya. Realisasi dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung. Sementara itu, pada 2019, anggaran infrastruktur dalam APBN ditetapkan sebesar Rp415,0 triliun atau meningkat 1,04% dibanding tahun 2018. Pemanfaatan anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur antara lain pembangunan 48 unit bendungan (40 dalam tahap lanjutan/*ongoing*) dan pembangunan/rehabilitasi 162 ribu ha jaringan irigasi¹⁸.

2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan mekanisme pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta penguatan cadangan pangan pokok tertentu lainnya selain beras

18 RAPBN 2019. Rencana pembangunan infrastruktur selengkapannya meliputi: pembangunan 687km ruas jalan nasional baru, 905km jalan tol, 48 unit bendungan (40 dalam tahap lanjutan/*ongoing*) dan pembangunan/rehabilitasi 162ribu Ha jaringan irigasi.

antara lain melalui optimalisasi penggunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP).

- a. Penguatan mekanisme pengelolaan CBP dengan sistem penggantian. Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) BULOG ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan *master budget* Perum BULOG yang bersifat sementara. Selanjutnya pada akhir tahun akan dilakukan audit oleh BPKP untuk menetapkan HPB secara final. Atas penggunaan CBP oleh masing-masing Kementerian/Lembaga diajukan penggantian (*reimbursement*) oleh Perum BULOG kepada KPA Penyalur Dana CBP setiap bulan setelah melalui verifikasi oleh masing-masing Kementerian yang bertanggungjawab dalam penggunaan CBP. Mekanisme ini direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2019. Selain penguatan mekanisme pengelolaan CBP, level CBP juga terus perlu dijaga sebesar 1 - 1,5juta ton. Angka ini adalah hasil Rakortas Pangan 28 Maret 2018. Berdasarkan kriteria FAO, Cadangan Beras Pemerintah adalah sebesar 3%-5% dari konsumsi atau setara 900 ribu ton-1,5 juta ton dengan asumsi konsumsi beras sebesar 30,37 juta ton (Neraca Pangan Kementan, 2018).
 - b. Penguatan cadangan pangan pokok tertentu lainnya selain beras antar lain melalui optimalisasi penggunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP). Dana CHSP sudah dianggarkan sejak tahun 2010, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal karena belum adanya kepastian mengenai kriteria penggunaannya. Upaya optimalisasi penggunaan dana CSHP akan dilakukan oleh Pemerintah dengan mempermudah syarat penggunaan dana stabilisasi harga pangan baik untuk produsen maupun konsumen dan memutuskan pihak yang menjadi KPA (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian).
- 3. Penguatan pengelolaan impor-ekspor.** Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam kondisi terjadinya gangguan pasokan dan kondisi harga barang kebutuhan pokok berada diatas/dibawah harga acuan, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga antara lain melalui kebijakan pengelolaan ekspor/impor. Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan pengelolaan ekspor/impor antara lain dengan cara: (1) memberikan

triliun Rp

Uraian	2010 Realisasi	2011 Realisasi	2012 Realisasi	2013 Realisasi	2014 Realisasi	2015 Realisasi	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi
I. Kementerian Negara/Lembaga	11,1	20,2	23,3	22,2	18,9	37,3	26,6	30,8	34,1
1. Kementerian Pertanian	8,0	16	18,2	15,9	13,2	28,7	21,1	21,9	23,8
2. Kementerian PU dan PERA (Irigasi)	3,1	4,2	5,1	6,3	5,7	8,6	5,5	8,9	10,3
II. Non Kementerian/Lembaga	38,3	37,5	40,8	42,4	44,2	54,7	68,2	56,8	39,4
1. Subsidi	35,8	32,9	33,2	38,3	39,5	53,2	49,4	49,1	28,5
a. Subsidi Pangan	15,2	16,5	19,1	20,3	18,2	21,8	22,1	19,5	-
b. Subsidi Pupuk	18,4	16,3	14	17,6	21	31,3	26,9	28,8	28,5
c. Subsidi Benih	2,2	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,8	-
d. Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-
2. Belanja Lain-lain	-	1,5	4,4	-	-	1,5	3,4	2,53	5
a. Cadangan Beras Pemerintah	-	1	2	-	-	1,5	2	2,5	2,5
b. Cadangan Stabilitas Harga Pangan	-	-	1,4	-	-	-	1,4	0,0	2,5
c. Cadangan Benih Nasional	-	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-
d. Cadangan Ketahanan Pangan	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-
3. Transfer ke Daerah (DAK)	2,5	3,1	3,2	4,1	4,7	-	15,4	5,1	5,9
a. DAK Irigasi	1	1,3	1,3	1,6	2,2	-	12	3,6	4,2
b. DAK Pertanian	1,5	1,8	1,9	2,5	2,5	-	3,4	1,5	1,7
Total	49,4	57,7	64,1	64,6	63,1	92	94,8	87,6	73,5

Tabel III.3. Anggaran Ketahanan Pangan

Sumber: Kementerian Keuangan

persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan; (2) memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. Penguatan kebijakan impor ke depan difokuskan pada ketepatan jumlah dan *timing* pelaksanaan impor.

III. 3. 2. Memperkuat Kelembagaan

1. Penyesuaian ketentuan asuransi pertanian Ketidakpastian menjadi salah satu risiko di dalam sektor pertanian sebagai dampak dari bencana alam, perubahan iklim ekstrim, atau serangan hama penyakit yang menjadikan petani menghadapi kegagalan panen. Guna melindungi petani dari resiko adalah dengan menyediakan fasilitas asuransi pertanian. Asuransi pertanian saat ini baru tersedia untuk beras dan daging sapi. Kedepan, asuransi pertanian dapat diperluas ke komoditas lainnya seperti bawang merah, cabai dan jagung.

2. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang Implementasi skema SRG dilaksanakan dengan berlandaskan PMK 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SRG) dan Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Tujuan diadakannya Sistem Resi Gudang (SRG)¹⁹ adalah sebagai berikut: (1) Untuk menyimpan hasil pertanian sehingga dapat

¹⁹ SRG sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

menjaga stok pangan nasional yang akan berdampak pada kestabilan harga; dan (2) Sebagai alternatif pembiayaan bagi petani karena Resi Gudang dapat menjadi agunan pembiayaan kepada bank/lembaga keuangan lainnya. Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang adalah : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, Timah, Pala, Ikan dan Bawang Merah. Penetapan selanjutnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemda, instansi terkait atau asosiasi komoditas. Ke depan, perluasan implementasi SRG akan terus dilakukan terutama pada cakupan gudang dan komoditas SRG yaitu beras pada 2018 – 2019 dan komoditas lainnya pada 2020 – 2021. Beberapa rencana perluasan SRG ke depan antara lain: peningkatan peran aktif pelaku usaha SRG, pengembangan model bisnis SRG hulu-hilir, pelaksanaan penjaminan SRG, perluasan lembaga pembiayaan SRG, dan persiapan implementasi SRG tanpa warkat (e-resi gudang). Selain itu, peningkatan pemanfaatan SRG dapat dilakukan melalui sinergi antar instansi yakni Kemendag, Kementan, Kemenko Ekonomi, Kemenkop, dan Kemendesa sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

3. Penyesuaian ketentuan KUR Pertanian untuk infrastruktur panen Permodalan petani merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 317 triliun dengan outstanding Rp 132 triliun, dan NPL 1,24%. Program yang akan dilaksanakan pada 2018 – 2019 oleh Pemerintah antara lain adalah skema pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk merevitalisasi penggilingan padi skala kecil. Selama ini penggilingan padi skala kecil kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan karena tidak *feasible* dan *bankable*²⁰. Penggilingan padi kecil memiliki persoalan saat panen karena sekitar 95% penggilingan padi kecil tidak memiliki alat pengering (*dryer*) sehingga tidak dapat menjaga kualitas beras yang dihasilkan²¹. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pengadaan mesin *dryer/drying center* atau pengeringan Gabah kering panen (GKP) menjadi gabah kering giling (GKG) yang dapat digunakan oleh semua petani dengan biaya operasional yang terjangkau. Berdasarkan kesepakatan Rakor pada 11 April 2018, prinsip skema KUR revitalisasi *dryer* adalah sebagai berikut: (1) Tidak untuk perusahaan swasta dan tidak untuk membeli penggilingan padi baru; (2) Jangka waktu KUR diarahkan selama 3 tahun; dan (3) Harus bekerjasama dengan Perum BULOG. Sehubungan dengan rencana penyempurnaan skema KUR penambahan *dryer* untuk penggilingan padi, perlu dilakukan perubahan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dengan menambahkan pokok-pokok skema KUR penambahan penggilingan padi didalamnya. Ke depan, pada 2020 – 2021 penyempurnaan skema ketentuan KUR akan dilakukan untuk komoditas pangan strategis lainnya.

4. **Perluasan implementasi kartu tani.**²² Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian adalah pupuk. Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi

20 Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini terdapat sekitar 182.000 penggilingan padi di Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 172.000 atau sekitar 94% merupakan penggilingan padi kecil. Sisanya, sekitar 2.000 penggilingan besar dan 8.000 penggilingan sedang.

21 Beberapa kendala pasca panen yang dihadapi petani antara lain: (1) tidak adanya/terbatasnya fasilitas pengeringan (*dryer*) atau lantai jemur sehingga penjemuran padi terkendala utamanya pada musim hujan; (2) keterlambatan panen gabah karena terbatasnya tenaga kerja; (3) ketebalan tumpukan gabah dipenjemuran sehingga penjemuran menjadi tidak optimal; dan (5) terdapat risiko gabah yang terbuang apabila menggunakan lantai jemur. Berbagai kendala tersebut mendorong petani untuk menjual hasil panennya ke tengkulak sehingga petani tidak mendapatkan nilai tambah dari pejualan hasil panennya.

22 Kartu tani adalah basis data yang menunjukkan profil petani secara lengkap, mulai dari luas dan lokasi lahan, jadwal panen, penjatahan pupuk, hingga akses pembiayaan perbankan. Kartu tani ini merupakan fase baru agar ke depan sektor pertanian Indonesia semakin maju, modern, dan yang terpenting bisa memfasilitasi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan.

petani melalui subsidi harga pupuk. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Untuk meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasinya, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan bank-bank Himbara membuat sistem untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani. Kartu Tani dibentuk berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan amanat APBN 2018. Dalam implementasinya, dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam hal penyempurnaan data petani basis NIK serta input data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)²³ berbasis sistem (e-RDKK). Hingga 2017/2018 implementasi Kartu Tani telah mencakup lima provinsi di Pulau Jawa. Penyelenggaraan Kartu Tani masing-masing oleh BRI di Jawa Tengah, Mandiri di Jawa Barat, BNI di Jawa Timur, dan BTN di Banten. Pemanfaatan Kartu Tani saat ini masih terbatas pada penyaluran Program Subsidi Pupuk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ke depan, pada 2019 – 2021, pendistribusian Kartu Tani direncanakan akan mencakup sepuluh Provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Ke depan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengintegrasikan kartu tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian.

5. **Mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani.** Upaya Pemerintah untuk memperkuat kelembagaan petani, antara lain dengan mendorong pembentukan kawasan pertanian berbasis korporasi (*contract farming*). Rencana penyempurnaan pembentukan kawasan pertanian tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Salah satu proyek percontohan kawasan pertanian yang baru saja diselesaikan pada 2018 adalah kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang berada di Provinsi Banten dengan komoditas prioritas jagung sesuai dengan komoditas prioritas kawasan pertanian nasional. Kegiatan *pilot project* jagung di Kabupaten Lebak dilakukan secara tumpang sari di lahan

23 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Perum Perhutani seluas 1.000 ha dan pendampingan akan dilakukan selama dua tahun mulai 2018-2019. Target *pilot project* penanaman perdana jagung berbasis korporasi akan mampu berproduksi 8 ton per ha. Di kawasan percontohan ini, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan petani guna meningkatkan kualitas produksi, pembinaan dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi petani, fasilitasi alat dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolahan. Pemerintah juga mendorong pembukaan akses terhadap modal dan pemasaran.

6. **Memperkuat pasokan bahan bakar dengan non BBM**

Program Mandatori B20 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 20% Biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis Solar yang telah mulai diberlakukan sejak Januari 2016. Implementasi mandatori B20 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Pada 2018, Pemerintah memperluas mandat Biodiesel²⁴ 20% atau B20 sebagai salah satu bahan bakar alternatif untuk mengimbangi konsumsi bahan bakar fosil, khususnya solar. Perluasan mandatori B20 mulai diberlakukan sejak 1 September 2018. Dengan perluasan ini, mandatori biodiesel tidak lagi hanya untuk sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan pembangkit listrik PLN, namun juga untuk kereta api dan sektor non-PSO. Pelaksanaan perluasan mandatori B20 tersebut diatur melalui Perpres 66 tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jumlah Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang mengikuti program ini adalah sebanyak 11 perusahaan. Penandatanganan kontrak antara BU BBM dan BU BBN telah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2018 di kantor Sekretariat Jenderal ESDM. Rencana ke depan akan dilakukan sosialisasi ke media dan *end user* meliputi sektor ESDM (migas, pertambangan, kelistrikan) dan sektor perhubungan (transportasi darat, laut, udara) serta sektor industri (pabrik).

²⁴ Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dengan mencampur minyak solar biasa, dengan biodiesel yang dihasilkan dari produk pertanian seperti minyak kelapa sawit. B20 merupakan perpaduan dari 20% biodiesel dan 80% solar minyak bumi.

III. 3. 3. Kelancaran Distribusi

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis yakni Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah dan Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan.

Keseimbangan permintaan dan penawaran saja tidak cukup untuk menjamin kestabilan harga. Panjangnya rantai distribusi serta rendahnya konektivitas dari sentra produksi ke konsumen juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Selain program ketahanan pangan, rendahnya inflasi pangan dan disparitas harga pangan juga perlu didukung oleh perbaikan sistem distribusi bahan pangan yang lebih efisien. Upaya mendorong kelancaran distribusi dalam mendukung pengendalian inflasi 2018 – 2021 dilaksanakan melalui dua program yaitu mendorong kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan.

III. 3. 3. 1. Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD. Pada 2018 – 2019, Kemendagri menargetkan tersedianya *business model* berdasarkan komoditas atau daerah. Dari sisi daerah, program tersebut difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki bobot kota inflasi terbesar. Selain itu, Pemerintah Pusat akan memfasilitasi daerah untuk memasok Jakarta sebagai daerah konsumen terbesar dengan mengoptimalkan BUMD. Dari sisi komoditas, model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah akan difokuskan pada sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi *volatile food*, antara lain: bawang merah di Jawa Tengah, cabai merah di Jawa Barat, daging sapi di NTT, dan telur ayam di Jawa Timur.

Ke depan hingga 2021, akan dilakukan implementasi pilot project berdasarkan komoditas atau daerah.

Pada tahap pengembangan lebih lanjut, difokuskan pada potensi pengembangan rantai perdagangan. Sebagai contoh, Blitar sebagai sentra ayam petelur dimana terdapat lebih dari 4.321 peternak dengan jumlah ayam petelur ±15 juta ekor dan produksi per hari sebesar 450 ton (40% dari total produksi telur di Jawa Timur). Peternak membutuhkan pasokan komoditas pembuat pakan ayam yang terdiri dari 50% jagung, 30% bungkil kedelai, 10% tepung tulang ikan, dan 10% lainnya. Sementara itu, terdapat potensi pasokan jagung dari Sulawesi Barat sebagai daerah surplus produksi jagung sebagaimana tercermin dari positifnya data pengiriman ke daerah lain di pelabuhan pada 2017 sebesar 9.035 ton. Sementara itu, produksi jagung di Sulawesi Barat pada 2018 mencapai 284,213 ton sehingga diperlukan peta jalur

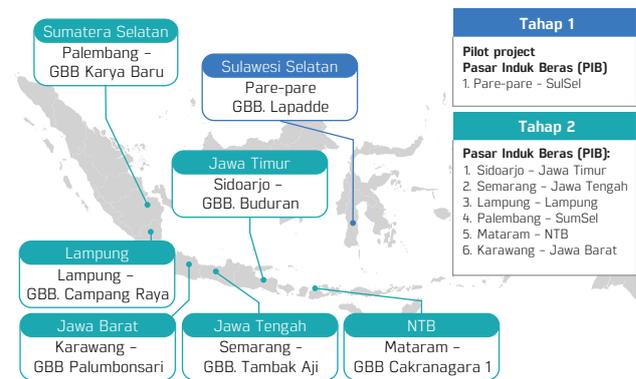
distribusi pemasaran jagung, pelaku utama dalam perdagangan baik produsen maupun pedagang pengepul, perkembangan kelembagaan petani jagung di daerah Sulawesi Barat, serta dukungan Pemerintah Daerah.

III. 3. 3. 2. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan.

Upaya lain untuk mendorong kelancaran distribusi adalah dengan meningkatkan infrastruktur perdagangan, yaitu dengan membentuk *innovation lab* antara lain *digital business incubator*, *fintech village* dan mendorong fasilitasi dan *advisory* LMKM untuk memanfaatkan *platform digital farming*. Pada 2018, sekretariat TPIP akan mengembangkan platform *e-commerce* pangan untuk membantu meningkatkan akses pasar bagi petani. Selain untuk tujuan peningkatan kesejahteraan petani, *platform* ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi tata niaga pangan. Sebagai proyek awal akan dikembangkan untuk wilayah Jawa Tengah. Dalam kaitan tersebut, beberapa tahapan pengembangan yang akan dilakukan meliputi: pemberdayaan dan pendampingan petani, pengembangan aplikasi, dan pengembangan akses pasar bagi petani. Kementerian kunci yang terlibat meliputi Kementerian Pertanian terkait pendampingan petani dan Kemenkominfo terkait dukungan ketersediaan jaringan alat bantu komunikasi. Keterlibatan TPID dalam pengembangan platform *e-commerce* pangan adalah terkait penyediaan data dan informasi dari sisi pasokan (penyediaan petani, jenis dan volume komoditas) dan sisi *off taker*. Pengembangan platform *e-commerce* pangan juga ditujukan dalam rangka pembangunan peta agro, dimana data dan informasi secara spasial terkait data harga di tingkat konsumen dan produsen, biaya distribusi serta data stok tergambar secara *real time* dalam peta agro.

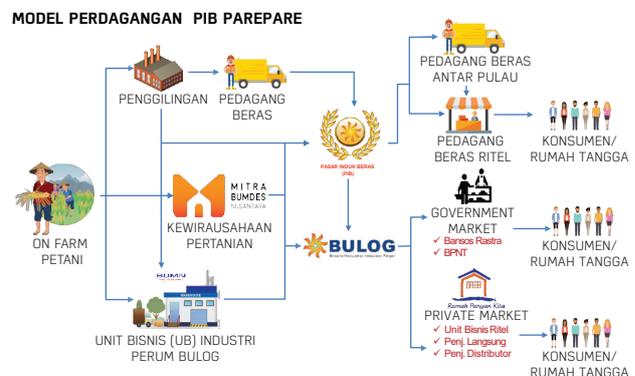
Dalam rangka mendukung upaya peningkatan infrastruktur perdagangan, Perum BULOG akan melakukan pembangunan Pasar Induk Beras (PIB) dan sarana konektivitasnya di 7 sentra produksi di Jawa dan luar Jawa dengan tahap awal akan dilakukan di Sulawesi Selatan dan kemudian dilanjutkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan NTB. Adapun fungsi strategis PIB antara lain: (i) sebagai instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk pengendalian harga pangan; (2) menjadi acuan data stok dan harga pangan untuk perumusan kebijakan pangan nasional dan daerah; (3) pusat perdagangan dan ekonomi wilayah dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah; (4) mengetahui pola distribusi perdagangan pangan antar wilayah untuk pengembangan kebijakan sistem logistik nasional; (5) meningkatkan pengembangan kewirausahaan petani; (6) meningkatkan penyerapan hasil produksi petani sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani;

dan (7) menjamin ketersediaan keterjangkauan dan akses pangan kepada masyarakat. PIB ini akan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang lengkap serta teknologi informasi yang terintegrasi. Model perdagangan PIB Pare-pare Sulawesi Selatan merupakan program kemitraan (*on farm*) antara Petani dengan Mitra BUMDES, penggilingan swasta dan Unit Bisnis BULOG. Dalam model perdagangan ini, Petani memiliki opsi untuk menjual produk pertaniannya ke Mitra BUMDES, atau langsung ke penggilingan milik swasta maupun Unit Bisnis (UB) Industri Perum BULOG. Penggilingan swasta melalui pedagang beras dan Mitra BUMDES akan menjual produk pertanian di PIB, demikian pula UB BULOG. *Pilot project* PIB Lapadde di Pare-pare diharapkan akan mampu menyediakan berbagai jenis beras sesuai dengan preferensi konsumen, berkualitas karena telah melalui pemeriksaan kualitas rutin sebelum dilelang dan diperdagangkan, memiliki harga yang kompetitif karena sewa tempat di PIB yang murah, serta adanya jaminan kontinuitas pasokan beras di PIB oleh BULOG. PIB Lapadde akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur perdagangan seperti ATM, Bank, kantor pemasaran PIB, kios, masjid, pujasera, toilet umum, aula, poliklinik, lapangan tenis, parkir mobil dan truk, serta mesin *rice to rice* dan mesing *packaging*.



Gambar III.11. Rencana Pengembangan Pasar Induk Beras (PIB)

Sumber: Bulog



Gambar III.12. Model Perdagangan Pasar Induk Beras Pare-Pare

Sumber: Bulog

III. 3. 4. Komunikasi Efektif

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis yakni **Memperbaiki Kualitas Data dan Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah**. Penguatan komunikasi efektif melalui perbaikan kualitas data bertujuan untuk menghindari risiko spekulasi dengan mengurangi *assymetric information* yang terjadi antara produsen, pedagang, dan konsumen. Penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara dilakukan melalui penguatan mekanisme koordinasi pusat-daerah dan penguatan kapasitas institusional.

III. 3. 4. 1. Perbaikan Kualitas Data.

Upaya peningkatan kualitas data inflasi dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan penyempurnaan metodologi pengambilan data. Beberapa sub program yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas data adalah:

1. Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian.

Kebijakan Satu Peta (KSP) dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. KSP ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan. Dalam sektor pertanian, penggunaan KSP bermanfaat dalam mendukung kebijakan perluasan lahan pertanian. Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi antara lain melalui peningkatan produktifitas lahan *existing*, menghentikan konversi lahan produktif, implementasi reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan kombinasi berbagai program/kegiatan. Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain. Kementerian Pertanian (Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian/BBSDLP) pada 2017 telah menghasilkan Peta Gambut skala 1:50.000 dan Peta Tanah Semi Detil skala 1:50.000 yang seluruhnya telah terintegrasi dan terstandarisasi pada tahun 2016 dan 2017. Pada 2018, BBSDLP harus memenuhi target 25 Peta Gambut skala 1:50.000 untuk lokus Papua, dan 182 Peta Tanah Semi Detil skala 1:50.000 untuk lokus Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Ke depan untuk mendukung kedaulatan pangan, KSP bermanfaat untuk memastikan ketersediaan lahan dan kesiapan daerah termasuk infrastruktur pendukungnya. Pada 2018 – 2019, KSP lahan pertanian untuk komoditas padi diperkirakan akan telah dapat diselesaikan, kemudian

dilanjutkan dengan komoditas lain pada 2020 – 2021.

2. Peningkatan korelasi data PIHPS dan BPS.

Data inflasi komoditas yang ada di PIHPS saat ini sudah cukup baik mencerminkan data komoditas pangan strategis yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS. Hal ini tercermin dari besarnya korelasi antara data inflasi komoditas pangan strategis di PIHPS dengan BPS yang cukup tinggi kecuali minyak goreng dan gula²⁵. Kedepan kualitas data PIHPS akan terus ditingkatkan antara lain melalui peningkatan kualitas verifikasi data.

3. Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok.

Berdasarkan Peta Jalan pengembangan PIHPS, fokus pengembangan di tahun 2018 adalah penyediaan data harga di tingkat produsen. Ketersediaan informasi harga dari tingkat produsen sampai dengan pedagang eceran yang bersentuhan langsung dengan konsumen akhir sangat penting bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dengan cakupan informasi yang semakin luas, diharapkan juga dapat menambah referensi bagi publik dalam memperoleh informasi terkait pangan dari sistem informasi yang sudah ada baik di level nasional maupun daerah, serta mendorong tata niaga perdagangan komoditi pangan menjadi lebih efisien. Dari sisi ketersediaan data stok, sejak 2017 Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang mewajibkan distributor bahan pokok melaporkan volume stok secara berkala sebagai tindak lanjut Rakornas TPID tahun 2017. Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa hal yang akan dikembangkan dari PIHPS antara lain melakukan penjajakan pengembangan data stok pangan strategis. Pada 2018 – 2019, ditargetkan data yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar termasuk data stok tersebut telah tersedia di pasar tradisional sampai dengan pedagang besar. Ke depan, pada 2021 data ditargetkan akan tersedia di pasar tradisional sampai dengan produsen di seluruh provinsi.

4. Perbaikan kualitas data inflasi pangan dan barang strategis lainnya termasuk data produksi dan stok.

Sebagai tindak lanjut program kerja TPIP tahun 2017, HLM TPIP pada Januari 2018 telah menyepakati upaya penguatan kualitas statistik inflasi dengan berkoordinasi dengan BPS yang mencakup inflasi komoditas pulsa ponsel, beras, dan angkutan udara. Pada 2018, telah dilaksanakan koordinasi

²⁵ Korelasi inflasi Telur Ayam, Beras, Daging Ayam, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Cabai Rawit pada periode 2017 – 2018 diatas 0,9. Sementara Daging Sapi dan Cabai Merah diatas 0,8, sedangkan Minyak goreng dan Gula masih dibawah 0,5.

antara Bank Indonesia, BPS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan BULOG untuk perbaikan metode pencacahan ketiga komoditas tersebut serta dilaporkan dalam forum HLM TPIP 24 Agustus 2018. Harmonisasi metode pencacahan akan dilanjutkan pada tahun 2019 mengingat masih terdapat beberapa permasalahan teknis di lapangan dalam pengumpulan data.

III. 3. 4. 2. Memperkuat koordinasi Pusat dan Daerah.

Upaya penguatan koordinasi Pusat dan Daerah dilakukan melalui dua sub program yaitu koordinasi dalam menetapkan kebijakan *administered price* dan peningkatan kapasitas anggota TPID.

- 1. Koordinasi kebijakan *administered price* yang sesuai dengan sasaran inflasi IHK.** Koordinasi ini antara lain dilakukan terhadap potensi penyesuaian harga BBM bersubsidi dan ketentuan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara. Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat terdapat gap yang cukup besar antara harga keekonomian dan harga jual BBM bersubsidi saat ini. Apabila penyesuaian dilakukan secara sekaligus, hal tersebut berpotensi menyebabkan terlewatnya sasaran inflasi. Untuk angkutan udara, penyesuaian batas atas atau batas bawah tarif angkutan udara dapat mengurangi volatilitas inflasi. Penyesuaian dapat terjadi seiring perkembangan harga avtur dan nilai tukar rupiah.
- 2. Peningkatan kapasitas anggota TPID.** Peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi daerah melalui forum TPID sangat penting. Melalui kegiatan pembinaan TPID diharapkan TPID dapat meningkatkan pemahaman seluruh anggota TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terhadap peran masing-masing anggota dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperlukan mengingat intensitas mutasi pejabat daerah yang sering terjadi. Melalui kegiatan pembinaan TPID, diharapkan kinerja TPID akan semakin baik didukung dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembinaan TPID akan diinisiasi Sekretariat TPIP yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pertemuan langsung, maupun secara *online*²⁶. Dalam pengembangan pembinaan TPID, sekretariat TPIP juga tetap mempertimbangkan masukan kebutuhan TPID dan beberapa Kementerian/Lembaga. Secara umum konsep materi pembinaan TPID akan dibagi untuk level teknis dan kepala daerah yang meliputi:

²⁶ Pelatihan secara langsung dilakukan secara klasikal dengan jumlah peserta terbatas mempertimbangkan efektifitas penyampaian materi. Sementara untuk pelatihan online sekretariat akan menyediakan modul materi dalam bentuk visual.

No	Materi
1.	Inflasi dan Pembangunan daerah
2.	Tatacara Perhitungan Inflasi
3.	Monitoring Inflasi atau Harga-harga
4.	Merancang Program Kerja TPID
5.	Penganggaran APBD yang mendukung Pengendalian Inflasi
6.	Sinergi RKP dan RKPD yang mendukung pengendalian Inflasi
7.	Kerjasama Antar Daerah
8.	Panduan Pelaksana Operasi Pasa dan Pasar Lelang Komoditas
9.	Program Unggulan TPID
10.	Sistem logistik Daerah
11.	Evaluasi Kinerja TPID
12.	Berbagi dari TPID untuk TPID
13.	Studi Kasus
14.	Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah

Tabel III.4. Materi Pembinaan TPID Level Teknis

No	Materi
I.	Inflasi dan Pembangunan Perekonomian Kebijakan yang mendukung Pengendalian Inflasi, Arti penting pengendalian Inflasi, Evaluasi Kinerja TPID
II.	Kebijakan Moneter dan Analisis Inflasi Gambaran Perekonomian (Global dan Domestik), kebijakan Moneter, Bauran Kebijakan, Tugas dan Peran KPWDN BI
III.	Optimalisasi Peran APBN dan APBD Untuk Mendukung Kesinambungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kebijakan APBN, Kebijakan Transfer Daerah, Politik Fiskal, Kondisi Fiskal
IV.	Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk mendukung Tercapainya Sasaran Pembangunan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Sinergi RKP dan RKPD, Kerjasama Antar Daerah, Akuntabilitas Kebijakan

Tabel III.5. Materi Pembinaan TPID Level Kepala Daerah

- 3. Penguatan Kelembagaan TPID.** Guna memperkuat kelembagaan TPID perlu dilaksanakan evaluasi kinerja TPID untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan di masing-masing wilayah. Evaluasi kinerja TPID tetap akan dilakukan dengan menggunakan dua aspek pendekatan, yakni aspek tujuan (*outcome*) dan aspek proses. Aspek tujuan (*outcome*) dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yakni pencapaian tingkat inflasi. Sementara untuk aspek proses akan dievaluasi berbagai upaya TPID yang diwujudkan dalam program kerja konkrit di setiap daerah. Evaluasi kinerja TPID akan menentukan daerah yang akan menerima TPID *Award* setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi kinerja TPID dihadapkan pada beberapa tantangan yang menuntut penyempurnaan formula evaluasi kinerja TPID. Hal tersebut akan menjadi salah satu program kerja penguatan kelembagaan TPID pada 2019.



Gambar III.13. Penyesuaian Pengukuran Kinerja TPID Tahun 2018

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Lampiran

Tabel
Peta Jalan
Pengendalian
Inflasi
2019 – 2021



KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM 2018-2019	Timeline Target		Keterangan
			2018-2019	2020-2021	
1	Keterjangkauan Harga	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai turunan dari PP 17/2017 dan Kepres 23/2017 tentang Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> Penyelarasan program/kegiatan K/L terkait pengendalian inflasi nasional melalui forum-forum koordinasi perencanaan Optimalisasi penggunaan <i>e-planning</i> dan <i>e-move</i> untuk mengawal proses perencanaan hingga implementasi program/kegiatan terkait pengendalian inflasi. Optimalisasi Pasar Murah/Operasi Pasar 10 komoditas bahan makanan pangan strategis*, dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah**. <ul style="list-style-type: none"> Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga). Menjaga volatilitas nilai tukar melalui pengembangan instrumen derivatif suku bunga dan nilai tukar untuk mendukung pelaksanaan lindung nilai, termasuk infrastruktur pasar keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Juknis PP 17 TH 2017 dalam bentuk Permen PPN/Bappenas Beras, Daging Sapi, Bawang Merah Volatilitas nilai tukar 	<ul style="list-style-type: none"> Komoditas lainnya Volatilitas nilai tukar 	<ul style="list-style-type: none"> Bappenas Kemendag Bulog BI Kemenkeu
		<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keseimbangan internal perekonomian <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Kebijakan Moneter Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan melalui pemanfaatan program di Desa, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> PDB Aktual di sekitar PDB Potensial Konsumsi beras per kapita menurun 	<ul style="list-style-type: none"> PDB Aktual di sekitar PDB Potensial Konsumsi beras per kapita menurun 	<ul style="list-style-type: none"> BI Kementan

*) Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir (indikator dalam PIHPS)
 **) Antara lain berupa uji coba pendistribusian beras renceng/sachet dan akan dilanjutkan dengan pangan renceng/sachet lainnya oleh Bulog untuk memberikan varian baru bagi masyarakat yang dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing konsumen. Pendistribusian melalui toko kelontong maupun Rumah Pangan Kita.

KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	Timeline Target		Keterangan
			2018-2019	2020-2021	
2	Ketersediaan Pasokan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal) <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi bantuan sarana produksi (benih, pupuk dan alsintan) yang didukung oleh Pembangunan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah sentra produksi oleh Pemda. ★ Perbaikan sistem budidaya (kalender tanam) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi Peningkatan investasi untuk ternak sapi Mempercepat pemanfaatan PMN Bulog untuk infrastruktur pasca panen ★ Percepatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pembebasan lahan oleh Pemerintah daerah. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton. ★ Penguatan cadangan pangan pokok tertentu lainnya selain beras antara lain melalui optimalisasi penggunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan**** Penguatan pengelolaan Impor-ekspor <ul style="list-style-type: none"> Meneruskan mekanisme perumusan kebijakan impor-ekspor pangan melalui Rakortas Perekonomian dan penetapannya di sidang kabinet 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisasi <i>on farm dan off farm</i> Padi, Bawang, Cabai > 56 m3/kapita Revisi PP No. 18/2015 Untuk kedelai, beras dan jagung* % Irigasi Rusak < 46%*** Menjaga level CBP Kajian utk menghitung jumlah CPP Jagung, Kedelai, Gula, Dg Sapi 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisasi <i>on farm dan off farm</i> Padi, Bawang, Cabai > 56 m3/kapita Peningkatan investasi PMA/PMDN Untuk beras** % Irigasi Rusak < 46%*** Level CBP mencapai 1-1,5 juta ton CPP Jagung, Kedelai, Gula, Dg Sapi telah tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Kementan Kementan KemenPUPR Kementan Bulog KemenPUPR Kementan Kemendag Kemenkeu Bulog
		<ul style="list-style-type: none"> ★ <i>Flagship Program</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Impor tepat jumlah dan tepat waktu 		<ul style="list-style-type: none"> Kemendag

*) Gudang kedelai; *Modern Rice Milling Process* (MRMP) di Jember dan Sumbawa; *Rice to Rice* (RTR); *Corn Dryer Center* (CDC)

**) *Modern Rice Milling Process* (MRMP) di Garut, Banyumas, Bojonegoro, Grobogan, Lampung dan Wajo

***) KemenPUPR, 2014

****) Disertai oleh penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah, jagung untuk industri pakan ternak, dan kedelai untuk pengrajin tahu tempe (amanat Perpres 48/2016).

KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	Timeline Target		Keterangan	
			2018-2019	2020-2021		
2	Ketersediaan Pasokan	Memperkuat Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian ketentuan Asuransi Pertanian Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Penyesuaian ketentuan KUR Pertanian utk inf. pasca panen (a.l. dapat dikaitkan dengan Sistem Resi Gudang) Perluasan implementasi Kartu Tani 	<ul style="list-style-type: none"> Beras, Daging Sapi Beras Beras Wilayah Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Beras, Daging Sapi, Bawang Merah, Cabai, Jagung Komoditas lainnya Komoditas lainnya* 5 provinsi luar Jawa** 	<ul style="list-style-type: none"> Kementan Kemenkeu Kemenko Eko. Kemenko Eko. Kementan Kemenkeu Kemendagri
			<ul style="list-style-type: none"> Mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani a.l melalui <i>contract farming</i> Memperkuat pasokan bahan bakar dengan non BBM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah lembaga ekonomi petani (beras, bawang merah, cabai) 	<ul style="list-style-type: none"> Akses pembiayaan/pasar bagi lembaga ekonomi petani komoditas* 	<ul style="list-style-type: none"> KemenESDM KemenIndustri
			Menjaga porsi bio diesel dalam campuran BBM min. 20%			

*) Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir (indikator dalam PIHPS)

***) Dari 10 rencana Kementan yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah

KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	Timeline Target		Keterangan	
			2018-2019	2020-2021		
3	Kelancaran Distribusi	Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, a.l. dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya <i>business model</i> berdasarkan komoditas atau daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>pilot project</i> berdasarkan komoditas atau daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri BI Kemenko Ek.
		Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk innovation lab antara lain <i>digital business incubator</i>, <i>fintech village</i> dan mendorong fasilitasi dan <i>advisory</i> UMKM untuk memanfaatkan <i>platform digital farming</i> Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi di Jawa dan Luar Jawa (perlu kajian lebih lanjut) 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi roadmap <i>e-commerce</i> Sulse (Pare-Pare), Jatim, Jateng, Jabar, Sumsel, Lampung, dan NTB 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah platform digital pangan Kalimantan, Papua, dan daerah timur lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> BI Kem.kominfo OJK KemenPUPR Bulog
4	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian Peningkatan korelasi data PIHPS dan BPS* Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok** Perbaikan kualitas statistik inflasi pangan dan barang strategis lainnya termasuk data produksi dan stok 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia untuk padi 5 komoditas berkorelasi min 0,8 dengan inflasi BPS Tersedia data di ps. tradisional s.d pedagang besar Inflasi beras, pulsa ponsel, angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia untuk komoditas lain* 10 komoditas berkorelasi min 0,8 dengan inflasi BPS Tersedia data di ps. tradisional s.d produsen di seluruh provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> BPS BI BI BPS
		Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan AP yang sesuai dengan sasaran inflasi IHK (antara lain <i>review</i> kebijakan batas atas batas bawah tarif angkutan udara) Melakukan pembinaan TPID 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan AP Tingkat kehandalan meningkat menjadi 40 (median) 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan AP Tingkat kehandalan meningkat menjadi 50 (median) 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenhub Kemen ESDM Kemendagri Kemenko Eko. BI Kemenkeu

*) Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir

***) Kemendag telah menerbitkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang mewajibkan distributor bahan pokok melaporkan volume stok secara berkala sebagai tindak lanjut Rakornas 2017

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

